

**MUARA BUNGO : PROFIL SEBUAH KOTA DI LINTAS SUMATERA  
(1967-2010)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan (SI)*



**YANTI MARETHA**  
2004/60878

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**MUARA BUNGO : PROFIL SEBUAH KOTA DI LINTAS SUMATERA  
(1967-2010)**

**Nama** : Yanti Maretha  
**NIM/BP** : 60878/2004  
**Program Studi** : Pendidikan Sejarah  
**Jurusan** : Sejarah  
**Fakultas** : Ilmu-ilmu Sosial

**Padang, 2011**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Drs.Zul Asri, M.Hum**  
**NIP.196006031986021001**

**Pembimbing II**



**Drs.Etmi Hardi,M.Hum**  
**NIP. 132047797**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan**



**Hendra Naldi. S.S,M.Hum**  
**NIP:196909301996031001**

## PENGESAHAN

*Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah  
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Muara Bungo : Profil Sebuah Kota Di Lintas Sumatera  
(1967-2010)

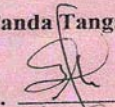
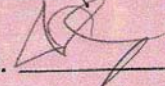
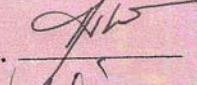
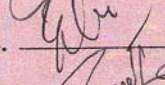
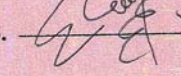
Nama : Yanti Maretha  
NIM/BP : 60878/2004  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 2011

### Tim Penguji

|                   | Nama                      |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Ketua</b>      | : Drs.Zul Asri, M.Hum     |
| <b>Sekretaris</b> | : Drs.Etmi Hardi,M.Hum    |
| <b>Anggota</b>    | : Hendra Naldi. S.S,M.Hum |
| <b>Anggota</b>    | : Drs.Gusraredi           |
| <b>Anggota</b>    | : Abdul Salam,S.Ag,M.Hum  |

### Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Maha suci engkau ya Allah

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, oleh karena itu apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan lakukanlah pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhan mulah kamu berharap  
(QS : Alam Nasyrah : 6-8)

Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalami lalu mema'afkan, maka bagi mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah (HR. Baihaqi)

ya Allah.....

Dalam setiap ujian yang Engkau berikan, membuat aku semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah penentu segalanya dalam hidupku, dan Engkaulah yang paling mengetahui mana yang terbaik untuk hamba Mu.....

Dengan sengenap sujud syukurku pada Mu ya Rohim, hari ini setitik kebahagiaan telah Engkau anugerahkan kepada ku sekeping cita-cita telah ku raih, walaupun semua itu kujalani dengan penuh rintangan dan keluh kesah, namun hatiku lega dapat mengambil hikmah dari semua ini .....

Ya Allah.....

Jadikanlah sepercik kesuksesan ini bukan akhir dari perjalanan, namun awal dalam menelusuri jalan yang masih panjang. Bantulah aku dalam menyusuri setiap jalan kehidupan ini agar selalu dalam ridho Mu, karena Engkaulah yang maha berkuasa atas segalanya.

Berkat ridho Mu aku bisa mempersembahkan sesuatu yang berharga dan berarti bagi kedua orang tua, saudara, keluarga dan diriku sendiri.

AYAHANDA DAN IBUNDA

Terima kasihku dengan setulus hati buat Alm : Ayahku (Drs. Nawawi. Is) yang tidak sempat melihatku meraih cita-citaku, namun ku percaya bahwa ayahanda dapat melihatnya dari sana.

Ibundaku (Dahniar) tercinta, terima kasih yang terdalem atas nasehat yang ibu berikan, sudah tak terhitung banyaknya pengorbanan dan derita yang ibu rasakan anakmu dapat memilih apa yang dicita-citakan ini.

Buat kakak (Yeni. H), abang (Tomi.H), adek (Boy Windy. A dan Novitasari ) dan Ponakan q (davi, farel, farhan & cica), terima kasih atas dorongan dan semangatnya yang telah diberikan.

Dan tak lupa buat kanda (Gusti) yang telah menanti agar adindanya dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik.....

Thanks' yang tak terlupakan buat teman-temanku sejarah angkatan O4 semuanya : onak, di2 dan tira, akhirnya km menjapai finis itu. rozy (thanks bantuan na ya), Mbak wulan (kejar tayang), Ampuang (Yety), ampuang (yanto), a2n, irhas & i2l.....akhirnya kita Spd jg....buat : Nova, e2n, shinta, meri, mira, Rel, hendri, ajo, zul, mico, efdil, dian, (tetp semangat teman, jgn pernah putus asa). Buat sejarah O3 (b'deki, k'reni, b'ivan), sejarah O5 (dewi, yogi, nadia, vival, reka, shanty, nila) & sejarah O6 ( i2s,evi, novi, yu2n).

Buat yang tak tersebut mohon ma'af.....ttp trus berusaha & berjuang ya.....  
Terima kasih atas kebersamaan yang tak kan pernah terlupakan dan merupakan masa-masa terindah dalam belajar slama kita di UNP.

Buat warga Uk 5B : o2m, tante dan adex2 semua na. Raya, deboy, Inez, andri, risquē, syukron & doni (ttp semangat & trs belajar tx meraih cita2 & masa depan ya).

Terakhir buat warga pinang sori no.6.....wo mike & nte amoy (semangat trs ya), u2n, nanda, nike, rika, anggi, rina & rini.....

Kebersamaan slama ini takkan pernah terlupakan, aku bahagia memiliki teman-teman seperti kalian, terima kasih semuanya I LV U ALL.....

Akhir kata dari Mu ya Robbi aku dating.....  
Dan kepada Mu aku kembali  
Hari ini takkan terjadi tanpa izin dari Mu  
Ya Rohim.....  
Sembah sujudku, aku bersyukur kepada mu.....



By : Yanti Maretha ' O4

#### **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or similar character.

Yang menyatakan,

## ABSTRAK

Yanti Maretha (60878/2004) : Muara Bungo : Profil Sebuah Kota Di Lintas Sumatera (1967-2010). Skripsi. Padang : Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Kota Muara Bungo merupakan kota yang terletak di sepanjang jalan lintas Sumatera. Skripsi ini mengkaji tentang proses perkembangan kota Muara Bungo dalam pembangunan fisik (pembangunan, jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya) dan pembangunan ekonomi (berkaitan dengan sektor perdagangan, jasa dan industri). Pembangunan kota Muara Bungo yang mengalami perkembangan dari sebelum dan setelah tahun 1967-2010, yang serta kaitannya dengan kebijakan pemerintahan dalam mengupayakan pembangunan kota. Perkembangan pada waktu-waktu inilah yang menarik untuk dikaji.

Tujuan dari penulisan skripsi ini, sesuai dengan rumusan masalah yaitu : menjelaskan bagaimana perkembangan fisik kota Muara Bungo sesudah dibangunnya jalan lintas Sumatra pada tahun 1967-2010.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, melalui empat tahap yaitu (1) Heuristik, merupakan tahap pengumpulan data, berupa data primer dan data sekunder, (2) Kritik Sumber, yaitu melakukan pengujian sumber melalui kritik internal dan kritik eksternal, (3) Analisis dan interpretasi data terhadap data-data yang diperoleh, (4) Historiografi, merupakan tahap penulisan karya ilmiah.

Hasil temuan mengungkapkan bahwa pada awal perkembangannya, kota Muara Bungo telah berusaha mengadakan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun ekonomi walaupun bersifat lambat, karena belum jelasnya arah dan kebijakan pembangunan yang dijalankan. Pada masa Kota Muara Bungo Sebagai Ibukota Kabupaten Bungo Tebo sudah mulai tampak, dengan diselenggarakannya Pembangunan Jangka Panjang. Disana mulai tampak arah kebijakan pembangunan kota di samping itu juga di keluarkannya beberapa peraturan pemerintahan yang menjadi pedoman pembangunan kota Muara Bungo, baik ekonomi maupun fisik. Setelah reformasi 1999 kota Muara Bungo Sebagai Ibukota Kabupaten Bungo, perkembangan pembangunan kota Muara Bungo dibidang fisik dan ekonomi sudah mengalami kemajuan yang pesat, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan di keluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah yang memberikan kebebasan pada tiap daerah untuk membangun daerahnya. Arah kebijakan pembangunan kota sudah diatur dalam peraturan daerah yang mencakup segala bidang. Dalam pembangunan fisik kota Muara Bungo terlihat dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, sedangkan dalam pembangunan ekonomi terlihat dengan peningkatan PDRB kota Muara Bungo yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Dari tahap perkembangan pemerintahan kota Muara Bungo di atas, dapat dilihat bahwa strategi dalam pembangunan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota, apabila kebijakan pembangunan belum ditata sedemikian rupa maka akan menghambat jalannya pembangunan suatu kota.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **MUARA BUNGO : Profil Sebuah Kota Di Lintas Sumatera (1967-2010)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana kependidikan pada Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Padang. Selain itu penulisan skripsi ini untuk menambah pengetahuan dan bekal pengalaman bagi penulis sebagai calon tenaga pendidik.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Zul Asri, M. Hum, sebagai dosen pembimbing I
2. Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum, sebagai dosen pembimbing II
3. Bapak Drs. Hendra Naldi, S.S, M. Hum, sebagai penguji
4. Bapak Drs. Gusrareddy sebagai dosen penguji
5. Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum, sebagai dosen penguji
6. Bapak Drs. Hendra Naldi, S.S, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Sejarah FIS UNP
7. Bapak-bapak selaku nara sumber yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta yang selalu mengirigi langkah penulis dengan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Dalam segala bimbingan dan bantuan yang Bapak/Ibu dan reka-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang penulis kemukakan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                            | Halaman     |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1           |
| B. Batasan dan Perumusan Masalah .....     | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 6           |
| E. Tinjauan Pustaka .....                  | 7           |
| F. Metode Penelitian Dan Sumber data ..... | 15          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM MUARA BUNGO</b>    |             |
| A. Keadaan Geografis dan Penduduk.....     | 17          |
| B. Sejarah Ringkas Kota Muara Bungo.....   | 23          |
| C. Kota Muara Bungo sebelum 1967.....      | 31          |
| D. Master Plan Kota.....                   | 41          |

### **BAB III PEREKEMBANGAN FISIK KOTA MUARA BUNGO**

#### **A. Perkembangan Kota Muara Bungo Sebagai Ibukota Bungo Tebo Tahun 1967-1999**

.....46

1. Pembangunan Fisik .....52

2. Pembangunan Ekonomi .....63

#### **B. Perkembangan Kota Muara Bungo Sebagai Ibukota Kabupaten Bungo**

19992010.....67

1. Pembangunan Fisik .....69

2. Pembangunan Ekonomi .....77

**BAB IV KESIMPULAN .....85**

**DAFTAR PUSTAKA .....87**

**LAMPIRAN.....90**

## DAFTAR TABEL

| Table                                                                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Luas Muara Bungo dan pembangian wilayah administrai Menurut Desa atau Kelurahan Tahun 2001.....                                 | 19      |
| 2. Penggunaan lahan di kota Muara Bungo .....                                                                                      | 20      |
| 3. Hasil karet rakyat Muara Bungo tahun 1927-1935 (ton) .....                                                                      | 22      |
| 4. Jumlah penduduk kota Muara Bungo dalam Kabupaten Bungo Tebo tahun .....                                                         | 47      |
| 5. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten sebelum pemekaran.....                                                         | 49      |
| 6. Jenis dan kondisi prasarana transportasi di kota Muara Bungo tahun 1999.....                                                    | 54      |
| 7. Luas dan produksi tanaman karet rakyat dirinci Per Kecamatan dalam Kabupaten Bungo Tebo tahun 1984-1998.....                    | 64      |
| 8. Produk Domestik Regional Bruto Kota Muara Bungo Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan usaha tahun 1967-1999.....            | 66      |
| 9. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Muara Bungo tahun 2001-2005.....                                                       | 73      |
| 10. Panjang jalan menurut status jalan kota Muara Bungo tahun 2001-2005.....                                                       | 74      |
| 11. Laju Pertumbuhan Produk Domesti Regionak kota Muara Bungo atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 1999-2009..... | 81      |
| 12. Produk Domestik Regionak kota Muara Bungo atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 1999-2009.....                 | 83      |

## **DAFTAR GAMBAR**

| <b>Gambar</b>                                                           | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Struktur Pemerintahan Muara Bungo Pada Masa Kesulthanan.....         | 27             |
| 2. Struktur Pemerintahan Muara Bungo Pada Masa Penjajahan Belanda ..... | 28             |
| 3. Struktur Pemerintahan Muara Bungo Pada Masa Penjajahan Jepang .....  | 30             |
| 4. Konsep Desain Pusat Kota Muara Bungo.....                            | 45             |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1945 sampai dengan 1967, pembangunan di Indonesia, termasuk di Muara Bungo tidak berjalan lancar akibat kondisi-kondisi politik, baik pada hal masa Revolusi, Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin. Di awal kemerdekaan, pembangunan Muara Bungo masih sangat minim, akibat keadaan pemerintahan RI sedang menghadapi revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan<sup>1</sup>. Keadaan pembangunan di Muara Bungo sampai pada awal Orde Baru relatif tidak banyak berubah dan sudah berusaha mengembangkan diri, baik dalam pembangunan fisik, maupun ekonomi. Pembangunan fisik, masih banyak digunakan bangunan-bangunan peninggalan Belanda, seperti Rumah Kontelour sekarang BRI, kantor BKR sekarang dijadikan kantor Dep.Diknas dan Budaya Muara Bungo, dan Asrama Balai Pertemuan Muara Bungo sekarang Asrama Polisi<sup>2</sup>. Pembangunan sudah mulai dilakukan, walaupun bangunan-bangunan tersebut masih bersifat sederhana karena masih kurangnya pengalaman dari segi teknis dan keadaan ini menyebabkan kota-kota di Indonesia khususnya kota Muara Bungo berada dalam keadaan kacau<sup>3</sup>.

Seperti kota lainnya, kota Muara Bungo tumbuh menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan bagi daerah kota dan daerah sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan ekonominya diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh adanya urbanisasi<sup>4</sup> dan juga tingkat kelahiran dan kematian penduduk kota Muara Bungo itu sendiri. Pertambahan penduduk dapat menjadi beban dan masalah dalam pengembangan kota. Penduduk membutuhkan tanah dan ruang sebagai tempat kegiatan interaksi dan tempat

---

<sup>1</sup>. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan*. Jakarta : Erlangga, 1990. hal: 24.

<sup>2</sup>. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Muara Bungo tahun 1945-1949. hal : 18-23.

<sup>3</sup>. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan*. Jakarta : Erlangga, 1990. hal: 24.

<sup>4</sup>. Imam Asy'ary. *Sosiologi Kota Dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional, 1993. hal : 63.

tinggal (pemukiman), dengan demikian dapat dilihat bahwa pada satu sisi penduduk dapat berperan positif terhadap perkembangan kota, namun pada sisi lain juga bisa menjadi aktor utama timbulnya masalah-masalah di perkotaan<sup>5</sup>. Selain itu juga akan muncul permasalahan ekonomi dan fisik menyangkut nilai pengembangan dan ekonomis yang dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di kota Muara Bungo.

Pelaksanaan pembangunan kota Muara Bungo membutuhkan perencanaan yang matang, artinya campur tangan pemerintahan setempat untuk menentukan arah pembangunan kota sangatlah penting. Pada tahun 1967, pemerintahan membangun jalan lintas Sumatera, salah satu kota yang dilewatinya adalah Muara Bungo. pembangunan Muara Bungo belum mengalami perkembangan yang begitu baik<sup>6</sup>, walaupun suatu strategi dan arah kebijakan pembangunan Muara Bungo pada masa ini adalah mengadakan rehabilitas dan peremajaan kota, mengadakan perluasan kota dan membuat Rencana Tata Ruang Kota, yang berdampak pada keteraturan tata ruang kota. Pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, pembangunan-pembangunan yang dilakukan adalah proyek pembangunan jembatan, pembangunan jalan lintas, pembangunan kantor-kantor pemerintahan di kawasan Pasir Putih. Di bidang ekonomi mulai memajukan industri dan perdagangan.

Pembangunan kota Muara Bungo pada masa Otonomi Daerah<sup>7</sup>, dengan otonomi daerah setiap daerah berhak memberikan peluang untuk mengadakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang dimiliki masing-masing daerah. Kota Muara Bungo tiap-tiap BWK memiliki keunggulan dan fungsi masing-masing, pusat pengembangan yang lebih diutamakan

---

<sup>5</sup>. N. Daldjoeni. 1978. *Geografis Kota dan Desa*. Bandung : PT. Alumni. Hal 78-80.

<sup>6</sup>. Pada masa orde baru perkembangan pembangunan kota Muara Bungo tidak terlepas pengaruhnya dari arah dan strategi kebijakan pembangunan Nasional yaitu dengan adanya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum pembangunan jangka panjang. Sesuai dengan jangka waktu tersebut maka setiap tahap disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

<sup>7</sup>. Pasca Orde Baru, dikeluarkanlah Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 dalam Undang-undang ini dijelaskan pada dasarnya bahwa perkembangan dan pembangunan daerah didasarkan pada otonomi daerah dan Undang-undang No. 32 tentang Otonomi Daerah, yaitu peningkatan pelayanan masyarakat untuk pemekaran wilayah dengan tujuan pemekaran wilayah itu sendiri.

adalah Wilayah Pembangunan (WP)<sup>8</sup>, yang mendukung kebijakan pembangunan. Pembangunan kota pada masa ini lebih banyak dan bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi kota Muara Bungo.

Dengan lancarnya jalan lintas Sumatera, maka akan memperdekat dan mempercepat hubungan antara kota-kota di Sumatera maupun kota-kota di Sumatera dengan kota-kota di Jawa. Hubungan baru itu tentu membawa perubahan terhadap pembangunan di pulau Sumatera, begitu juga dengan pembangunan kota Muara Bungo. Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintahan maupun swasta, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, pusat-pusat perbelanjaan, hotel dan fasilitas dan sarana umum lainnya. Peningkatan mata pencarian penduduk di berbagai sektor, prioritas utama perdagangan, jasa dan industri. Selain itu meningkatnya perkembangan ekonomi dapat dilihat dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>9</sup>, serta meningkatnya sektor perdagangan terutama berkaitan dengan ekspor dan impor.

Selain dari indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, indikator penentu tumbuh dan berkembangnya suatu kota juga ditentukan oleh kebijakan pemerintahan daerah dan status wilayahnya. Pemindahan Ibukota dari Bangko ke Muara Bungo berdasarkan Undang-undang 12 tahun 1956, membawa perubahan bagi kota Muara Bungo menjadi kota segala pusat kegiatan pemerintahan, politik dan ekonomi. Dengan perubahan tersebut, maka Muara Bungo memberikan cukup banyak peluang bagi para imigran untuk mendapatkan pekerjaan di kota yang baru ini.

---

<sup>8</sup>. Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), tahun 2005. pada Wilayah Pembangunan (WP), fungsi dan kegiatan utama yang dikembangkan pada daerah ini adalah sebagai pusat Ibukota, perkantoran pemerintahan, dan pendidikan kejuruan (Sekolah Menengah dan Akademik) dan fungsi kegiatan penunjang berupa pemukiman serta pelayanan fasilitas sosial budaya bersifat lokal.

<sup>9</sup>. Dinas Pendapatan Kota Muara Bungo, tahun anggaran 2006. Liat juga PDRB Muara Bungo, merupakan suatu indikator untuk melihat perkembangan kegiatan ekonomu yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa melihat apakah faktor produksinya dari atau dimiliki penduduk daerah setempat. Hasil perhitungan PDRB biasanya disajikan atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan.

Sampai sekarang, peneliti ilmiah tentang Muara Bungo sebagai sebuah kota di jalan lintas Sumatera belum pernah ditulis. Tulisan-tulisan yang ada hanya berupa laporan atau monografi yang ditulis oleh pihak pemerintah Muara Bungo, seperti : *Bungo Sekilas Lintas Pemerintahan Muara Bungo* yang ditulis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2005, *Potensi Unggulan dan Pesona Budaya Muara Bungo-Provinsi Jambi* ditulis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Pedoman Adat Muara Bungo* yang ditulis oleh Lembaga Adat Muara Bungo. Buku-buku tersebut ditulis oleh pemerintahan kota Muara Bungo hanya sebagai dokumen atau arsip pemerintahan, tidak untuk dipublikasikan.

Hal yang menarik dari penelitian mengenai sejarah kota Muara Bungo ini adalah **Pertama**, mengenai kota Muara Bungo sejauh ini belum mendapat perhatian dari sejarawan dan peneliti sejarah umumnya yang membahas secara kritis, yaitu suatu kajian historis tentang pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut, di antara karya-karya yang ada hanyalah membahas mengenai Muara Bungo secara umum..

**Kedua**, kota Muara Bungo sebagai daerah bagian dari Provinsi Jambi. Kota Muara Bungo menjadi sebuah kota yang mampu berdiri sendiri dan menjadi salah satu daerah otonom di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi dan sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Sumatera Tengah. Menarik dikaji karena untuk menjadi kota baru dari bagian Provinsi Jambi di Indonesia, kota Muara Bungo dihadapkan dengan berbagai persoalan, di antaranya pembentukan aparatur pemerintahan dan masalah pembangunan kota, apakah kota Muara Bungo mampu menjadi daerah otonom yang mandiri atau masih bergantung dengan pemerintah pusat.

*Ketiga*, sebagai sebuah kota baru dan bagian dari Ibu Kota Provinsi Jambi, banyak mengalami berbagai kendala dan permasalahan yang harus dihadapi terutama penambahan jumlah penduduk yang berpengaruh pada pembangunan fisik dan ekonomi. Permasalahan tersebut mendapat perhatian pemerintahan kota dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan kota. Hal ini menarik dikaji untuk hubungan dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap perkembangan kota Muara Bungo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang kota **MUARA BUNGO**: Profil Sebuah Kota Di Lintas Sumatra (1967-2010).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini tidak membahas sejarah Kota Muara Bungo secara keseluruhan. Temporalnya adalah tahun 1967 sampai 2010. Diambilnya tahun 1967, karena pada tahun 1967 merupakan dibukanya atau diresmikannya jalan lintas Sumatra yang melalui Muara Bungo. Sedangkan pada tahun 2010, merupakan masa akhir jabatan Bupati Muara Bungo ke-7 H.Zulfikar Achmad, pada masa jabatannya kota Muara Bungo mengalami perkembangan pesat apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Pengambilan waktu tersebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembangunan kota Muara Bungo sesudah jalan lintas Sumatra dibangun. Untuk memperjelas pokok persoalan yang akan dibahas maka diajukan pertanyaan, yaitu :

Bagaimana perkembangan fisik kota Muara Bungo sesudah dibangunnya jalan lintas Sumatra pada tahun 1967-2010 ?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini ialah :

1. Menjelaskan bagaimana perkembangan kota Muara Bungo sejak tahun 1967 sampai tahun 2010.
2. Menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintahan dalam pembangunan fisik kota Muara Bungo sejak tahun 1967 sampai tahun 2010, dalam kaitannya dengan perkembangan kota Muara Bungo.

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat, diantaranya ;

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi sumbangan bagi Ilmu Sosial khususnya mengeni Sejarah Kota.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintahan kota Muara Bungo dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pembangunan kota pada masa yang akan datang.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Studi Relevan

Sejauh ini sudah ada beberapa studi sejarah yang berkenaan dengan kota, pertama *Kota Bukittinggi 1945-1998: Perkembangan Kota Secara Fisik dan Hubungannya Dengan Kepemilikan Tanah* yang ditulis oleh Zul'Asri (2001) yang membahas bagaimana hubungan antara kepemilikan tanah dengan perkembangan fisik di kota Bukittinggi. Kedua, *Sejarah Kota Painan* yang ditulis oleh Handayani (1998) yang melihat bagaimana perkembangan kota Painan dalam bidang pemerintahan. Ketiga, *Sejarah Kota Sungai Penuh 1958-1998* yang ditulis oleh Thelma (2003) yang melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan kota Sungai Penuh sebagai Ibukota dari Kabupaten Kerinci dan bagaimana perkembangan bangunan fisiknya. Keempat, *Perluasan Kota dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kota*

*Padang 1980-1998* yang ditulis oleh Firma Dona (2006). Kelima, *Sejarah Kota Sijunjung (1969-1994)* ditulis oleh Nurhajidarmi (2002), melihat bagaimana perkembangan fisik kota Muara Sijunjung. Keenam, *Perkembangan Solok Selatan 1946-2003* yang ditulis oleh Fitri Dewi (2005), melihat bagaimana perkembangan fisik Solok Selatan menjadi daerah sendiri. Ketujuh, *Perkembangan Fisik Kota Pekanbaru Sebagai Kota Minyak 1946-1999* yang ditulis oleh Dian Lestari (2008).

Karya tulis berupa buku di antaranya : Pertama, *Muara Bungo Sekilas Lintas* yang di tulis oleh Pemerintah Kabupaten Muara Bungo Tahun 2005, membahas sekilas sejarah Muara Bungo, Monografi daerah Muara Bungo dan keadaan serta pembangunan daerah Muara Bungo. Kedua, *Gema Bungo Sepucuk Bulat Seurat Tunggang Tahun 2000* di tulis oleh bagian Humas Setda Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, membahas tentang berita-berita utama, berita daerah, kesehatan, dan bina kepagawaian Muara Bungo. Ketiga, *Potensi Unggulan Dan pesona Budaya Kabupaten Bungo-Provinsi Jambi* ditulis oleh BAPPEDA Kabupaten Muara Bungo, membahas tentang sejarah ringkas, geografi dan monografi, tradisi prosesi Rajo Sehari Suku Anak Dalam, Potensi Unggulan Bidang Perkebunan (Karet dan Sawit), bidang pertanian, peternakan dan perikanan, sumberdaya alam dan berbagai objek wisata alam serta infrastruktur pendukung.

Keempat, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, di tulis oleh Ilham (1990), membahas mengenai wawasan mengenai perkotaan, mulai dari aspek perkembangan, permasalahan, strategi/kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan kota, serta mengenai peraturan yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Kelima, *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, di tulis oleh Colombijin, Freek.DKK, Yogyakarta: Ombak (2005), membahas mengenai sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia pada masa kolonial sampai sekarang. Berhubungan dengan dekoloniasasi Indonesia yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada perkotaan. Keenam, *Bunga Rampai*

*Pembanguann Kota di Indonesia dalam Abad 21, Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 2*, di tulis oleh Urband and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Jakarta: Universitas Indonesia (2005), mengemukakan pengalaman pembangunan perkotaan di Indonesia, baik pengalaman pembangunan secara nasional maupun pengalaman pembangunan di daerah.

## **2. Konseptual**

Penelitian mengenai kota sangat menarik untuk dikaji, karena kehidupan masyarakat kota cukup kompleks. Selain mencakup aspek fisik seperti geografi dan ekologi juga mencakup aspek non fisik seperti sosial, politik ekonomi, pendidikan, agama dan budaya. Keberadaan kota pada dasarnya menyangkut penduduk dengan segala aktivitasnya, sehingga hal tersebut nantinya memunculkan fenomena-fenomena sosial budaya dan lainnya.

Selanjutnya kota juga mencakup aspek sejarah, karena kota tumbuh seiring dengan tingkat perkembangan masyarakatnya yang nantinya akan melahirkan suatu sejarah kota. Menurut sejarah awal terbentuknya dan berkembangnya sebuah kota berasal dari tempat pemukiman yang sangat sederhana, selanjutnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan masyarakatnya. Dengan demikian kota tidaklah tumbuh dengan sendirinya, melainkan manusialah yang mengembangkannya untuk memenuhi hidup baik kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural.

Sejarah kota adalah sejarah dari urbanisasi sebagai proses kemasyarakatan, proses urbanisasi ini terjadi tidak secara mendesak dan menyeluruh<sup>10</sup>. Pada masyarakat kota banyak terdapat ciri-ciri pedesaan, sehingga batas antara desa dan kota sukar ditegaskan. Batasan tersebut menjadi jelas dalam ketentuan administrative. Sedangkan menerut pendapat Sartono Kartodirjo<sup>11</sup>, Sejarah kota adalah pertumbuhan sebuah kota dari masa ke masa sebagai pusat

---

<sup>10</sup>. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Tiara Wacana, 1994) hal : 52

<sup>11</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah* (Jakarta:Gramedia, 1992). hal :

pemukiman, tempat terjadinya beberapa kegiatan berupa pelayanan pemerintahan, pementasan kesenian, proses produksi dan lain-lain. Perkembangan kota akan terjadi karena adanya pembangunan.

Kota memiliki cangkupan yang luas yang mengandung banyak dimensi, sehingga sulit untuk merumuskan suatu definisi yang tepat untuk kota. Secara umum kota dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk, di mana sekelompok orang hidup dalam wilayah tertentu dan berpola rasional ekonomi serta individualis dengan segala aktivitasnya<sup>12</sup>. Bintarto<sup>13</sup> mendefinisikan kota dalam sudut pandang geografi yaitu, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materilistik atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materilistik dibandingkan dengan daerah di belakangnya.

Kota digolongkan menurut fungsi dan peranan<sup>14</sup>, pada hakekatnya ditentukan oleh keadaan geografis dan potensi yang dimiliki kota tersebut serta hubungannya dengan daerah di sekitarnya. Dengan adanya potensi tertentu yang menonjol, maka terbentuklah kota dengan ciri atau fungsi tertentu, yaitu : kota sebagai pusat produksi perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat rekreasi dan pusat kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka apabila dilihat dari perkembangannya, kota Muara Bungo pada awal perkembangan berperan sebagai kota pusat perdagangan dan sejalan perkembangannya

---

<sup>12</sup>. Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, ( Surabaya: usaha Nasional, 1990 ).  
hal : 4.

<sup>13</sup>. Bintarto. *Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Galia Indonesia, 1983 ).  
hal ; 10.

<sup>14</sup>. Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, ( Surabaya: usaha Nasional, 1990 ).  
hal : 13.

perkembangannya kota Muara Bungo sekarang sudah memiliki beberapa peran tidak hanya sebagai pusat perdagangan tapi juga pusat industri dan jasa.

Mengenai sejarah pertumbuhan, perkembangan dan kemusnahan kota erat kaitannya dengan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya masyarakatnya dan ekologi. Sjoberg<sup>15</sup>, mengajukan tiga persyaratan bagi kehidupan kota, yaitu (1) ekologi yang cocok, (2) teknologi yang memadai untuk kondisi pertanian dan non pertanian (3) adanya organisasi yang kompleks yang memiliki struktur kekuasaan yang memberikan perlindungan dan ketertiban bagi penduduknya.

Selain itu, Setiap kota memiliki karekteristik yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Karekteristik kota tersebut di antaranya adalah : (1) jumlah dan kepadatan penduduk, (2) Corak kehidupan masyarakat bersifat heterongen (beragam atau tidak sama), (3) Mata pencarian penduduknya, dominan non pertanian, (4) Mobilitas penduduknya tinggi, karena memiliki kepentingan sendiri-sendiri, (5) Sratifikasi sosial kompleks.

Faktor geoggrafis mempengaruhi perkembangan kota, kota yang terletak di sepanjang jaringan perhubungan (lalu lintas perhubungan darat dan perairan) akan berdampak ekonomis. Seperti kota yang terletak di sepanjang jalan lintas Sumatera berfungsi sebagai jaringan perdagangan yang mengangkat hasil perkebunan dan perdagangan yang terdapat di daerah pedalaman ke pelabuhan atau pusat-pusat perdagangan, dengan demikian daerah tersebut menjadi ramai dan terbentuklah kota. Lintas Sumatera atau tempat-tempat yang strategis di sepanjang jalan lintas merupakan lokasi strategis, karena dapat memberikan kemudahan menghubungkan daerah lintas dengan daerah pedalaman maupun dalam hubungan antar daerah. Dalam hal ini kota Muara Bungo merupakan salah satu di antara kota-kota di Indonesia yang terletak di sepanjang jalan lintas Sumatera.

---

<sup>15</sup>. Pasai Kota Pelabuhan Jalur Sutra, Kumpulan Makalah Diskusi. (Jakarta:Depdikbud RI, 1997 ) : 45.

Permulaan berkembangnya kota Muara Bungo dimulai pada satu titik, pada mulanya kota Muara Bungo merupakan sebuah wilayah kecil dengan nama Muara Bungo yang berasal dari dua kata yaitu Muara dan Bungo. Nama Muara berasal dari kata "*Moro*" dalam bahasa Jawa yang berarti '*bermalam, datang atau tiba*' dan Bungo diambil dari sebuah nama Bunga Pohon Jambe yang dibawa oleh bangsawan Jawa dan di tanam di sepanjang sungai dengan nama Bungo Dani<sup>16</sup>. Abad ke-17 tahun 1615, dari daerah Sungai Dareh sampai ke Tebo sudah ada penduduk yang menetap tetapi untuk Muara Bungo belum adanya penduduk atau pun pemukiman, makanya untuk daerah Muara Bungo itu dinamakan dengan Gono Hulu Jambi.

Kota Muara Bungo mulai ada pertama kali di desa Tanah Periuk Muara Bungo yang terletak di sepanjang lintas Sumatera bagian Barat. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu jalan lintas Sumatera sangat penting untuk menghubungkan daerah kota Muara Bungo dengan daerah-daerah sekitarnya dan mempermudah kegiatan perekonomian penduduknya terutama untuk mempermudah sarana perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan geografis sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah kota, baik fungsi dan bentuk fisik dari perkembangan kota tersebut.

Kota-kota akan selalu tumbuh dan berkembang, dalam perkembangannya biasanya ditentukan oleh faktor yang erat kaitannya dengan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan kota, seperti kebutuhan perumahan, fasilitas dan utilitas kota, transportasi dan lalu lintas kota, komunikasi dan hubungan fungsional antara kota tersebut dengan kota-kota atau daerah-daerah lainnya. Berarti dalam melihat perkembangan sebuah kota melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintahan ataupun penguasa setempat.

---

<sup>16</sup>. Lembaga Adat Muara Bungo. *Buku Pedoman Adat Muara Bungo*. (Muara Bungo, 2004)

Menurut Slamet Ryadi<sup>17</sup>, pembangunan merupakan suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tapi terkendali dalam ruang lingkup keadilan sosial dari kemajuan kualitas dan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi.

Pelaksanaan pembangunan perkotaan khususnya pembangunan daerah yang sesuai dengan cita-cita nasional harus dirumuskan atau direncanakan terlebih dahulu dalam bentuk strategi pembangunan. Strategi pembangunan perkotaan tersebut harus sesuai dengan Tujuan Pembangunan Nasional. Kebijakan pembangunan perkotaan berlangsung secara bertahap dan berencana menurut pola pengembangan wilayah berdasarkan suatu rencana tata ruang yang menyeluruh, meliputi pengamatan kota itu sendiri, daerah pedesaan sekitar kota<sup>18</sup>.

Perkembangan suatu kota juga bergantung pada pembangunan ekonomi, dari sana dapat dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi juga diartikan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan kelembangaan<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> .

<sup>18</sup> Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, ( Surabaya : Usaha Nasional, 1990 ) hal : 26

<sup>19</sup> Lincolin Arsyat. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : 1999. Hal 11-12. . Dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian : (1). Suatu proses yang berarti perubahan yang berlangsung terus menerus, (2). Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat, (3). Kenaikan pendapatan perkapita tersebut terus berlangsung dalam jangka panjang, (4). Perbaikan sistem kelembangaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembangaan tersebut biasanya ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan bidang organisasi dan perbaikan bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).

Pembangunan kota Muara Bungo lebih diarahkan dan dilaksanakan secara merata, bukan hanya pembangunan fisik dan keruangan serta pembangunan ekonomi yang serba rasional dan fungsional tetapi juga mengacu pada perkembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, sehingga pembangunan tersebut memiliki arti penting terhadap pertumbuhan perkembangan kota dan juga masyarakat kota itu sendiri.

### 3. Teori

Kota menunjukkan suatu fenomena yang kompleks, selain mencakup aspek fisik seperti geografis dan ekologi juga mencakup aspek non fisik, seperti : politik, sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan budaya. Kota juga mencakup aspek historis, karena kota tumbuh dengan seiring dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Para pakar perkotaan umumnya menyatakan bahwa dalam perkembangan suatu kota di kenal adanya tiga teori perkembangan kota, yaitu : Teori Konsentris, Teori Sektor dan Teori Pusat Inti Ganda<sup>20</sup>. Dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan kota, teori yang dipakai dalam melihat perkembangan kota Muara Bungo adalah Teori Sektor. Karena secara singkat teori ini menyatakan bahwa daerah-daerah kelas satu cenderung berada di tepian terakhir dari suatu atau lebih sektor.

Teori sector ini menyatakan bahwa perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam sebuah kota berangsur-angsur menghasilkan kembali karekter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu dan mempunyai tiga faktor yang menyebabkan perkembangan sebuah kota, yaitu :

1. Faktor Alami (natural factor), dapat dianggap sebagai faktor yang relative statis. Hal ini bukan berarti bahwa faktor alami itu tidak mengalami perkembangan, namun secara bentuk perubahan yang terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

---

<sup>20</sup> Raharjo. *Perkembangan Kota dan Perkembangan*. Jakarta : Bumi aksara. Tahun 1996

2. Faktor Kependudukan dan aspek sosial ekonominya yang mempunyai sifat jauh lebih dinamis apabila dibandingkan dengan faktor di atas. Sehubungan dengan kuantitas penduduk perkotaan ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota, yaitu :

a. Pertambahan alami dari penduduk kota. Pertambahan ini diperhitungkan dari banyaknya kelahiran dikurangi dengan banyaknya kematian dari penduduk kota.

b. Pertambahan penduduk yang disebabkan oleh adanya pendatang-pendatang (Urbanisasi)

3. Faktor Budi Daya, maksudnya adalah suatu tingkat kepandaian manusia dalam usahanya untuk mengelola lingkungannya dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.

Kota selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, baik dari segi fisik maupun non fisik dengan tujuh kriteria kota, yaitu :<sup>21</sup>

1. Mencapai kepadatan tertentu (menurut zaman dan lokasi)

2. Jenis struktur dan tata ruangnya seperti terlihat misalnya dari jalur-jalur jalan di dalamnya.

3. Merupakan tempat manusia tinggal dan bekerja.

4. Memiliki fungsi minimal, seperti adanya pasar, pusat administrasi dan politik, pusat keagamaan.

5. Mempunyai kepadatan heterogen.

6. Merupakan suatu pusat ekonomi yang memiliki hubungan dengan daerah pertanian.

7. Merupakan pusat pelayanan bagi daerah-daerah yang berada di sekitarnya.

Pada umumnya semua kriteria kota diatas dimiliki oleh kota Muara Bungo. Pembangunan kota Muara Bungo yang mempunyai arti penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota, bagi masyarakat Muara Bungo pada umumnya maupun masyarakat kota itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Zilfa, 1967-1998. Tesis, *Perkembangan Kota Bangkinang dalam Perspektif Sejarah*. UNP : Prongram Pasca Sarjana.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah<sup>22</sup>, dengan langkah-langkah kerja yang dimulai dengan tahap-tahap. Langkah awal *Heuristik*, merupakan tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai sejarah kota Muara Bungo digunakan dua jenis data, yaitu : berupa Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer, merupakan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kota Muara Bungo : seperti para Birokrat Dinas Tata Kota, Badan Pusat Statistik. Disamping data wawancara juga berupa arsip-arsip mengenai data jumlah penduduk, pola persebaran, undang-undang yang mengatur pembentukan kota Muara Bungo, peraturan pemerintahan kota Muara Bungo yang merupakan peraturan daerah kota muara Bungo yang menjadi acuan dalam perkembangan dan pembangunan kota Muara Bungo. Data Sekunder ini di peroleh melalui studi perpustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kota-kota umumnya dan kota Muara Bungo.

Data Sekunder, merupakan data tambahan yang mendukung data primer. Data Sekunder ini diperoleh melalui studi perpustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan kota-kota umumnya dan kota Muara Bungo khususnya. Data-data tersebut didapat melalui studi pustaka di perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Daerah Padang, Pustaka Daerah kota Muara Bungo, Perpustakaan Dinas Pendidikan Mura Bungo, Perpustakaan BAPPEDA Muara Bungo, Perpustakaan Badan statistik Kota Muara Bungo.

---

<sup>22</sup> Mestika Zed. *Metodologi Sejarah*. ( Padang: Universitas Negeri Padang, 2003 ) dan Hellius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah* ( Yogyakarta : Ombak, 2007 ).

Tahap kedua adalah *kritik sumber*, data maupun dokumen yang sudah dikumpulkan diseleksi untuk melihat tingkat keaslian atau keotentikan data tersebut. Dalam kritik sumber terdiri dari *kritik eksternal* dan *kritik internal*. Kritik eksternal adalah dengan melakukan pengujian otentitas atau keaslian data. Caranya adalah dengan melihat dan memperhatikan, apakah dokumen yang diperoleh merupakan dokumen atau arsip asli milik pemerintahan Muara Bungo. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji keabsahan informan yang diperoleh.

Tahap ketiga adalah melakukan *analisi*, sintesis dan *interpretasi*, yaitu dengan memilih sumber sejarah guna melakukan butir-butir informasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini telah dilakukan pengelompokkan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Setelah melakukan tahap analisis dilanjutkan dengan sintesis yaitu merangkai atau menghubungkan data dengan informasi yang sudah dianalisis. Tahap analisis ini tentu melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa yang di tulis.

Langkah terakhir adalah penyajian hasil penelitian (*Histiografi*), merupakan tahap akhir dimana data yang telah tiga tahap tadi kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan secara sistematis menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA MUARA BUNGO

#### A. Kondisi Geografis Dan Penduduk

Kota Muara Bungo merupakan salah satu kota di Indonesia yang terletak di bagian Barat Provinsi Jambi dan dilalui oleh jaringan jalan lintas Tengah Sumatera (jalan Nasional) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Sumatra Barat. Khususnya perkotaan Muara Bungo merupakan tempat transit (persinggihan sementara) bagi pergerakan kendaraan (Lubuk Linggau-Padang) yang melalui jalur lintas Tengah Sumatera<sup>23</sup>.

Dilihat dari aspek geografis, Muara Bungo ini mempunyai letak yang strategis karena terletak pada ruas Jalan Lintas Barat Sumatera. Lokasi Kecamatan Muara Bungo yang menjadi pusat pemerintahan kota Muara Bungo memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat bertumbuh dengan pesat karena berada pada jalur lalu lintas perekonomian yang menghubungkan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Penataan kota Muara Bungo yang tepat diharapkan dapat menjadikan wilayah ini menjadi titik pertumbuhan yang dapat menghela pertumbuhan daerah lain di wilayah Muara Bungo<sup>24</sup>.

Muara Bungo merupakan kota yang dikenal dengan motto "*Langkah Serentak Limbai Seayun*"<sup>25</sup>. Muara Bungo di sebut juga kota *LINTAS*, yaitu : Lancar, Indah, Nyaman, Tertib, Aman dan Sejahtera. Kota ini terletak di persimpangan jalan lintas Sumatera dan lintas

---

<sup>23</sup>. Bantuan Teknis Penyusunan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Muara Bungo. Tahun 2009. hal 1-3.

<sup>24</sup>. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo. Hal :24.

<sup>25</sup>. Bungo Sekilas Lintas, Pemerintahan Muara Bungo (BPPD).2005. Hal : 3-5. Langkah Serentak Limbah Seayun yang bermaksud : sebagai pernyataan bahwa anak Nagari mempunyai sifat watak dan pendirian. Anak Nagari seiyo sekato bersama-sama pemimpin dalam membangun daewrah, mengetumakan musyawarah dan mufakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masuarakat Muara Bungo yang berdiri di dalam Nagari berpagar Undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso, haruslah tudung menudung bak daun sirih, jahit-menjahit bak petani, hati gajah sama dilapah, hati tangan samo di cecah, adat sama di isi, lembango sama-sama di tuang, perintah samo dipatuhi, bak salako adat : berat samo dipikul, ringan samo dijinjing. Kebukit samo mendaki, kelurah samo menurun. Ado samo dimakan, dak samo dicari. Seciap bak ayam sedencing bak besi. Kok malang samo merugi, kok balabo samo mendapat. Terendam samo basah, terampai samo kering.

Jambi, yaitu arah ke Padang, Palembang, Lubuk Linggau dan Jambi. Terletak di antara 1°,20'-1°,40' Lintang Selatan dan 102°,02' -102°,30' Bujur Timur. Kota Muara Bungo mempunyai luas wilayah sekitar 7.881 Ha atau 5,86% dari luas wilayah Kabupaten Muara Bungo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table<sup>26</sup>.

**Tabel I1.1 Luas Kota Muara Bungo dan Pembagian wilayah Administrasi menurut Desa/Kelurahan**

| No | Desa/Kelurahan | Luas  |
|----|----------------|-------|
| 1  | Bungo Barat    | 444   |
| 2  | Bungo Timur    | 528   |
| 3  | Tanjung Gedang | 1.350 |
| 4  | Pasir Putih    | 2.350 |
| 5  | Sungai Pinang  | 278   |
| 6  | Manggis        | 2.931 |

Sumber ; Pasar Muara Bungo Dalam Angka, Hasil Perhitungan tahun 2001

Secara administratif Kecamatan Muara Bungo berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Tanah Sepenggal dan Kabuptaen Tebo  
 Sebelah Selatan : Pelepat dan Tabir Sarko  
 Sebelah Timur : Bathin II Babeko  
 Sebelah Barat : Tanah Sepenggal dan Rantau Pandan.

Kota Muara Bungo berada pada ketinggian kurang dari 100 Meter dari permukaan laut (dpl) dan sebagian kecil terletak antara 100–500 meter dpl. Topografi kota Muara Bungo yang sebagian memiliki kemiringan antara 0 – 15 %, berdasarkan kelas kemiringan lereng dapat menampung pengembangan kegiatan perkotaan dan memiliki kemiringan diatas 15 % serta lahan-lahan yang berada di sepanjang tepi sungai akan dijadikan lahan konversi atau kawasan penyangga.

---

<sup>26</sup>. Nafrizonny. Ringkasan Eklusif Kecamatan Muara Bungo, Koordinasi Statistik Kecamatan Muara Bungo. Tahun 2004. Hal : 1-2.

Morfologi kota Muara Bungo bergelombang, semakin ke Selatan morfologinya semakin bergelombang. Kondisi ini ditandai oleh banyaknya anak-anak sungai atau kali yang melalui wilayah Muara Bungo, yang bermuara ke Batang Bungo dan Batang Tebo. Ke Utara morfologinya relatif datar dan bergelombang. Sedangkan di bagian Tengah kota, permukaan tanahnya relatif datar, khususnya di sekitar kawasan perdagangan dan permukiman yang ada.

Jenis tanah meliputi kompleks podsolik merah hingga kekuning-kuningan bertstruktur lempung berpasir kasar dan berbatu-batu, struktur tanahnya gumpal dan kompleks latosol, terbentuk dari bahan induk vulkanik dan bahan vulkanik yang bercampur dengan podsolik merah kuning, andosol dan alluvial. Dari analisis topografi, kondisi geologi dan jenis tanah, wilayah kota Muara Bungo layak untuk mendukung kegiatan perkotaan, terutama dalam kaitannya dengan daya dukung lahan dan ketersediaan air.

Keadaan iklim kota Muara Bungo sangat lembab yang dipengaruhi oleh angin musim, yaitu : kemarau dan hujan. Curah hujan rata-rata pertahun di kota Muara Bungo adalah sebesar 2.502 mm/tahun dengan temperatur udara maksimum 33° C dan minimum 24° C dan banyaknya hari hujan dalam setahun 133 hari, maka dapat digolongkan bahwa kota Muara Bungo beriklim tropis dengan tingkat kelembaban relatifnya basah. Melihat curah hujan yang relatif tinggi, maka wilayah perencanaan termasuk ke dalam daerah resapan air yang cukup baik sehingga baik air tanah maupun air permukaan dapat digunakan secara regular untuk keperluan aktivitas perkotaan. Kenyataan ini juga didukung oleh dominasi sektor perhutanan dan perkebunan yang terdapat di kota ini. Di kota Muara Bungo mengalir dua sungai besar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari maupun untuk pertanian. Sungai-sungai besar tersebut adalah sungai Batang Tebo dan sungai Batang Bungo.

Penggunaan lahan kota Muara Bungo tahun 1999 didominasi oleh lahan untuk kegiatan perkebunan seluas 4.283 ha atau 54,34 % dari luas kota keseluruhan (7.881) ha. Berdasarkan data penggunaan lahan di kota Muara Bungo sebagian besar (lebih dari 60 %) merupakan lahan yang belum terbagun. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan perkotaan (perumahan dan fasilitas) hanya sebesar 2.519 ha atau 31,91 % dari luas kota keseluruhan. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di kota Muara Bungo dapat dilihat pada tabel.

**Table II.2 Penggunaan Lahan Di Kota Muara Bungo**

| No | Desa/Kelurahan | Tanah Sawah | Tanah Kebun | Perumahan | Hutan | Jumlah |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------|
| 1  | Bungo Barat    | -           | -           | 442       | -     | 444    |
| 2  | Bungo Timur    | -           | 8           | 447       | -     | 528    |
| 3  | Tanjung Gedang | 11          | 700         | 362       | -     | 1350   |
| 4  | Pasir Putih    | 10          | 1400        | 605       | -     | 2350   |
| 5  | Sungai Pinang  | 5           | -           | 270       | -     | 278    |
| 6  | Manggis        | 30          | 2175        | 365       | 110   | 2931   |
|    | Jumlah         | 56          | 4.283       | 2.519     | 110   | 7.881  |

Sumber : Kecamatan Muara Bungo Dalam angka, 1999

Perkembangan suatu daerah akan di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Pertambahan jumlah penduduk terjadi karena adanya faktor pertambahan alami yaitu jumlah kelahiran penduduk lebih besar dari pada jumlah kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor pertambahan non alami yaitu migrasi. Rencana pendistribusian penduduk di kota Muara Bungo didasarkan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, keberadaan prasarana dan sarana, fungsi kota atau BW dan kondisi daya tampung ruang yang sesuai dengan faktor lahan potensial untuk perkembangan fisik kota, yaitu pada lahan dengan kemiringan 0–15 %.

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk tahun 2001, bahwa penduduk kota Muara Bungo terkelompok atau terpusat di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Pinang dengan kepadatan penduduk sebesar 22 jiwa/ha, Kelurahan Bungo Barat kepadatan penduduk

sebesar 16 jiwa/ha dan kelurahan Bungo Timur kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/ha. Sedangkan tiga kelurahan lainnya memiliki kepadatan penduduk masih rendah (dibawah 10 jiwa/ha), yaitu kelurahan manggis, Tanjung Gedang dan Pasir Putih. Sedangkan hasil perhitungan pola persebaran jumlah penduduk tahun 2009 tidak berubah, yaitu tetap terpusat di tiga kelurahan diantaranya kelurahan Sungai Pinang dengan kepadatan 25 jiwa/ha, Bungo Barat kepadatan penduduk sebesar 16 jiwa/ha dan kepadatan penduduk di Bungo Timur sebesar 12 jiwa/ha<sup>27</sup>.

**Table II.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**

**Kota Muara Bungo**

| <b>No</b> | <b>Kelurahan</b> | <b>Jumlah Penduduk<br/>(jiwa)</b> | <b>Kepadatan<br/>(jiwa/ha)</b> |
|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Bungo Barat      | 7.284                             | 16                             |
| 2         | Bungo Timur      | 6.437                             | 12                             |
| 3         | Tanjung Gedang   | 5.144                             | 4                              |
| 4         | Pasir Putih      | 15.472                            | 7                              |
| 5         | Sungai Pinang    | 6.960                             | 25                             |
| 6         | Manggis          | 6.338                             | 2                              |
|           | Jumlah           | 47.635                            | 6*                             |

Sumber : Hasil Perhitungan, tahun 2009

Keterangan : \* kepadatan rata-rata

Kota Muara Bungo sebagai bagian dari Ibukota Provinsi Jambi sejak dulu merupakan kota perdagangan, pusat pemerintahan dan pusat pendidikan. Sebagai pusat kota hal itu tentu saja berpengaruh terhadap pertambahan jumlah penduduk, karena banyaknya arus urbanisasi menyebabkan pertambahan penduduk Muara Bungo. Penduduk Muara Bungo tidak hanya terdiri dari oleh penduduk asli tetapi juga terdapat penduduk pendatang, dari kawasan luar

<sup>27</sup> . Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Bungo. Tahun 2001. Hal : III-12 – III-14

kota Muara Bungo. Penduduk asli Muara Bungo sendiri berasal dari masyarakat Melayu Tuo yang pada umumnya tinggal mendiami anak-anak sungai Batanghari<sup>28</sup>.

Penduduk yang mendiami wilayah Kota Muara Bungo tidak hanya yang berasal dari wilayah sekitar Muara Bungo tetapi juga penduduk yang berasal dari luar Kota Muara Bungo, seperti : Jawa, Minang, Batak, Palembang dan lainnya. Pada umumnya mereka berkerja sebagai pengawai pemerintahan, pedagang, pengawai swasta dan lainnya. Selain itu ada juga penduduk keturunan bangsa asing seperti : Cina, India dan Arab, pada umumnya mereka mendiami wilayah pusat perdagangan seperti pasar Muara Bungo. Dengan masuknya penduduk pendatang tersebut menambah warna terhadap kota Muara Bungo yang dulu dianggap sebagai kota terbelakang<sup>29</sup>.

Mata pencarian penduduk kota Muara Bungo sangat bervariasi, menurut lapangan usaha terdiri dari pertanian, peternakan, perkebunan, pengawai pemerintahan, guru, pengawai swasta, perindustrian, perdagangan dan jasa. Wilayah kota Muara Bungo memiliki kekayaan alam dan potensi yang mendukung bagi perekonomian kota Muara Bungo. Bila dilihat pada sektor pertanian, tanaman yang ditanam seperti tanaman-tanaman padi sawah dan padi lading, karet, palawija dan sayur-sayuran. Daerah pertanian biasanya terletak di daerah yang dialiri sungai Batang Bungo dan Batang Tebo untuk mempermudah pengairan sawah atau ladang penduduk.

---

<sup>28</sup>. Lembaga Adat Muara Bungo, *Pedomana Adat Muara Bungo tahun 2004*. hal : 1. lihat juga Lembaga Adat Muara Bungo, *Buku Panduan Pemberian Gelar Adat di Bumi Langkah Serentak Limbah Seayun Muara Bungo*. Tahun 2002. Hal : 5. Bahwa penduduk Muara Bungo dari Homongen menjadi Heterogen (penduduk campuran) terutama pada daerah pusat perdagangan seperti di pusat kota Muara Bungo dan Ibukota Kecamatan. Percampuran terbesar adalah etnis Minang. Pembaharuan ini sudah berlangsung lama, sehingga orang Minang di Muara Bungo sudah merasa Muara Bungo merupakan daerah sendiri. Apalagi adanya perkawinan antara suku Minang dengan penduduk setempat yang telah berlangsung lama. Maka suku Minang tersebut telah menyatu dengan penduduk asli Muara Bungo. Percampuran kedua terjadi dengan pendatang baru transmingrasi dari Jawa, ini masih baru dan penempatan masih berkelompok sesama mereka.

<sup>29</sup>. BPS Muara Bungo, Muara Bungo dalam angka. Tahun 2006

## B. Sejarah Ringkas Kota Muara Bungo

Pada abad ke-17 tahun 1615 di Muara Bungo sekarang adalah hamparan hutan belantara Rimbo Gano (Rimbo Pedalaman Jambi Hulu)<sup>30</sup>. Pada permulaan abad ke 11 Hijrah bersamaan abad ke 17 M lebih kurang tahun 1617 M setelah mendapat izin dari Kesulthanan Jambi Sulthan Abdul Kahar. Kemudian rombongan melanjutkan ke Hulu kurang lebih pada pertemuan Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Bungo sekarang, pangeran Mangkubumi menaburkan bibit tumbuhan sebangsa Teratai yang di Jawa bernama Dani. Selanjutnya Pangeran melanjutkan perjalanannya ke hulu merintis Sungai Batang Tebo dan berhenti setelah menemukan isyarat yang diberikan oleh orang pintar Keraton Kartosuro, Dusun Tanah Periuk sekarang.<sup>31</sup>

Semakin hari silih berganti sehingga Kerajaan Balai Panjang semakin besar penduduknya dan semakin besar pusat kerajaan yang berada di Dusun Tanah Periuk. Kepergian Pangeran Mangkubumi tidak ada berita dan putus hubungan dengan Keraton Kartosuro, sehingga diutuslah Pangeran Mangubuwono untuk mencari Pangeran Mangkubumi di daerah pedalaman Jambi Hulu. Selanjutnya rombongan Pangeran Mangkubumi melanjutkan perjalanan ke hulu sungai dan mengarungi Sungai Batang Sarut yang mengikuti petunjuk dimilikinya. Sehingga pada pertemuan dua buah sungai yang penuh dengan akar duri dan ditutupi sebangsa bunga teratai beranekaragam warnanya. Tumbuhan tersebut isyarat yang dibawa oleh bangsawan Jawa sama dengan pohon Jambe sebelumnya. Di Jawa bunga tersebut bernama Bunga Dani, pada pertemuan kedua sungai tersebut terdapat sebuah tanjung, maka ditambatlah untuk bermalam atau Moro (bahasa Jawa), selanjutnya Pangeran Mangkubuwono memberi nama Tanjung tersebut Moro Dani<sup>32</sup>. Mengenai sejarah berdirinya

---

<sup>30</sup>. Lembaga Adat Muara Bungo. *Buku Pedomana Adat Muara Bung*. (Muara Bungo, 2004). Gono (Rimbo Pedalaman Jambi Hulu) yaitu belum seorang manusia sebagai penghuninya terkecuali binatang buas seperti Harimau, gajah, badak dan lainnya sebagainya.

<sup>31</sup>. Legenda Muara Bungo (asal usul Muara Bungo). Hal 1.

<sup>32</sup>. Ibid. Hal 2-5. Moro (bahasa Jawa) sama dengan datang, sedangkan Dani adalah jenis Bunga yang pada akhirnya menjadi Muara Bungo.

kota Muara Bungo berkaitan erat dengan sejarah daerah Jambi. Dalam hal demikian, wilayah Muara Bungo yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan sejak kerajaan Melayu dulu sampai akhir kesultanan Jambi, maka sesuatu yang terdapat di Muara Bungo, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan Jambi<sup>33</sup>.

Wilayah Muara Bungo yang kini kita kenal sebagai kota Muara Bungo pada masa pemerintahan kolonial Belanda, termasuk kedalam wilayah bekas Onder Afdeling Muara Bungo. Penduduk yang mendiami bekas Onder Afdeling Muara Bungo, menyebutnya orang Bathin, yang merupakan penduduk asli yang berasal dari Melayu Tuo yang mendiami anak-anak sungai Batanghari. Pada mulanya bekas Onder Afdeling ini hanya terdiri dari beberapa daerah Bathin, seperti : Bathin Batang Tebo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Bungo, Bathin Pelepat Senamat, Bathin III Ilir, Bathin V, Bathin III Ulu, dan Bathin Tanah Sepenggal<sup>34</sup>.

### **1. Pemerintahan Muara Bungo Pada Masa Kesultanan**

Sistem pemerintahan asli masyarakat Muara Bungo tidak banyak berbeda dari kerajaan Melayu sampai zaman kesultanan. Kerajaan di susun berdasarkan adat yang dipengang oleh nenek mamak secara turun temurun dan dipatuhi oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan hukum adat Muara Bungo. Adat istiadat itu tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintahan, karena antara nenek mamak selaku pemegang adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pemerintahan<sup>35</sup>.

Sistem pemerintahan kerajaan atau kesultanan pada masa lalu itu belumlah teratur, dan wilayah-wilayah yang merupakan wilayah pemerintahan daerah, juga belum teratur. Raja atau Sulthan menunjuk seorang sebagai pejabat atau kepala pemerintahan daerah, dengan piagam. Dengan penunjukan seorang yang diberi gelar Pageran Anom (dapat disamakan

---

<sup>33</sup>. Lembaga Adat Maura Bungo. *Pedoman adat Muara Bungo*.

<sup>34</sup>. Ibid. Hal : 2-3

<sup>35</sup>. Ibid. Hal : I

dengan wakil rakyat) yang berkedudukan di Balai Panjang, Tanah Periuk, ia disebut lantak Nan Tak Guyah, karena Pageran Anom ditunjuk langsung oleh Sulthan<sup>36</sup>.

Struktur tata pemerintahan tiap-tiap daerah mulai dari hirarki yang tertinggi sampai terendah memiliki pimpinan, yaitu :

1. kerajaan dipimpin oleh Raja
2. Rantau dipimpin oleh Jenang
3. Nagari dipimpin oleh Bathin
4. Luhak dipimpin oleh Penghulu
5. kampung atau dusun dipimpin oleh Tuo-tuo
6. Rumah dipimpin oleh Tenganai

Patih dalam dan Patih luar adalah merupakan kerapan Sulthan (system) sekarang sama dengan Kabinet dalam menjalankan pemerintahannya. Jenjang pemerintahan yaitu terkenal dengan *berjenjang naik berjenjang turun alam sekato rajo*, yang dimaksud alam adalah Negara. Struktur tata pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu<sup>37</sup> :

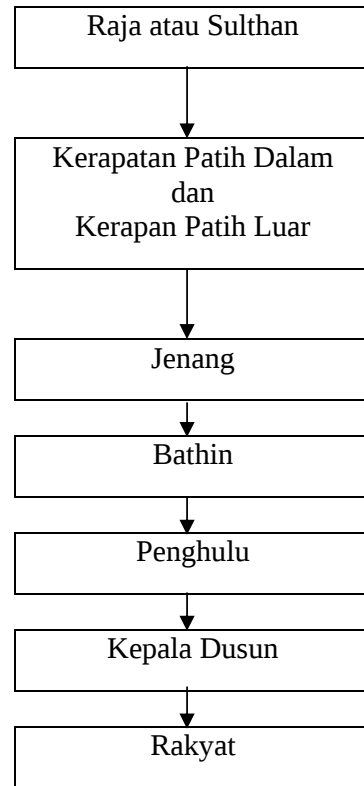
1. Raja atau Sulthan (kerapan patih dalam dan luar)
2. Jenang
3. Batin
4. Penghulu
5. Kepala Dusun
6. Rakyat

---

<sup>36</sup>. Lembaga Adat Muara Bungo, *Pedoman Adat Muara Bungo*. Tahun 2004. Hal :123. Penunjukan dengan Piagam ini bertebaran disana sini, sampai akhirnya terbentuklah daerah-daerah dengan kepala pemerintahan daerah, yang kemudian tersusun dengan seluko adat yang berbunyi : kampung nan berpenghulu, Negeri nan bathin atau disebut juga Tumenggung, Rantau nan bejenjang, Alam nan berajo, penghulu mengepalai kampung dan Bathin mengepalai Negeri yang terdiri dari beberapa kampung. Jenang mengkoordinir beberapa Negeri dan berfungsi sebagai wakil raja dalam daerah yang disebut Rantau.

<sup>37</sup>. Ibid. Hal : 124.

**Gambar III.5 Struktur Pemerintahan Muara Bungo Pada Masa Kesultanan**



## **2. Pemerintahan Muara Bungo pada masa Kolonial Belanda**

Muara Bungo pada tahun 1915 zaman penjajahan Belanda telah menyusun pemerintahan dengan kontreleur sebagai pimpinan tertinggi meliputi wilayah Muara Bungo sekarang, instansinya seperti PTT, Gedung Garam, Balasting, Guru, dan lain sebagainya. Pemerintahan daerah Muara Bungo semula masih sama dengan susunan pemerintahan pada masa kesultanan Melayu Jambi. Berarti sampai tahun 1926 struktur pemerintah Muara Bungo tetap dengan system pemerintahan bersifat otonom di luar pulau Jawa dan Madura berdasarkan ordonasi<sup>38</sup>.

<sup>38</sup>. Perpustakaan Muara Bungo, *Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo)*, hal : 30

Sesudah Belanda menguasai sepenuhnya Kesulthanan Jambi tahun 1906, maka di tahun 1926 wilayah Muara Bungo dibagi dalam wilayah-wilyah kecil, yang disebut Marga (kepala Pemerintahan) dengan gelar Pasirah. Marga-marga tersebut terdiri dari<sup>39</sup>:

- a. Marga Jujuhan, Ibu Negerinya Rantau Ikil.
3. Marga Bathin, Ibu Nagarnya Tanah Tumbuh
4. Marga Tanah Sepenggal, Ibu Nagarnya Lubuk Landai
5. Marga bathin III Ilir, Ibu Nagarnya Muara Bungo
6. Marga Bathin II, Ibu Nagarnya Bebeko
7. Marga Bathin VII, Ibu Nagarnya Rantau Pandan
8. Marga Pelepat, Ibu Nagarnya Rantau Kelayang
9. Marga Bathin III Ulu, Ibu Nagaryno Muara Buat

Pembentukan Marga dengan kepala Marga yang bergelar Pasirah, diambil dari Undang-undang Simbur Cahaya (UU adat Palembang) oleh Belanda, kemudian diterapkan diseluruh wilayah bekas kesulthanan Jambi dahulu. Sampai dikeluarkannya UU No.5 tahun 1979 status Marga di hapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa dengan sebutan Lurah dan Kepala Desa. Pembangunan Marga dibiayai dari dana IGOB dengan tarif 10% yang dikenakan pada hasil perkebunan karet, batu pasir, kayu dan lainnya sebagainya dengan istilah Bunga Batu atau Pasir, Pancung Alas atau Bunga Kayu dan sebagainya<sup>40</sup>.

Bersamaan dengan setelah dibentuknya pemerintahan otonom Marga Pasar Muara Bungo berdiri pula pemerintahan pasar Muara Bungo dengan kepala pasar Muara Bungo pertama H.Syahr bin.H.Bungsu alias H.Hanafi, yang diangkat oleh Pasirah kepala Marga Bathin III Ilir Muara Bungo setelah pemerintahan Pasar Muara Bungo terbentuk pembangunan semakin pesat oleh karena sudah ada pendatang yang berasal dari Solok,

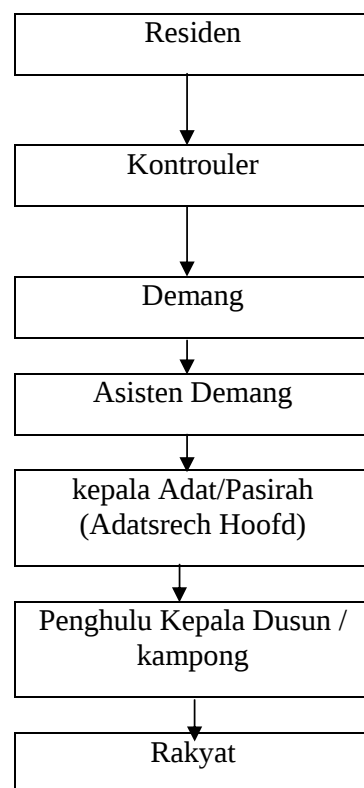
---

<sup>39</sup>. Buku Pedoman Adat Muara Bungo, lembaga Adat Muara Bungo. Tahun 2004. hal : 3

<sup>40</sup>. Ibid dan lihat juga Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo). Hal : 33. IGOB adalah Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten. Pegertian Marga dalam daerah Muara Bungo adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan tempat tinggal dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukum marga tersebut. Sedangkan pasirah adalah kepala Marga yang berkedudukan sebagai koordinator dalam pemerintahan daerahnya. Daerah yang mempunyai dusun sendiri dan harta benda sendiri dikenal dengan istilah Marga dengan Pasirah sebagai koordinator pemerintah di daerah.

Bukittinggi, Jawa dan lainnya. Pemerintah Marga dimulai pada tahun 1926 berlaku diseluruh kepulauan Indonesia Nusantara RI terkecuali pulau Jawa dan Madura yang berakhir tahun 1979 dengan dikeluarkan Undang-undang tentang pemerintahan desa Nomor 5 tahun 1979<sup>41</sup>. Hukum yang mengatur pemerintah desa adalah Hukum Adat. Dan para pejabat yang memerintah desa adalah pemangku adat, dengan demikian pemerintahan desa dapat dijalankan dengan baik. Rakyat sangat mematuhi pejabat desa, karena pejabat tersebut langsung dipegang oleh kepala adat mereka sendiri.

**Gambar III.6 Struktur Pemerintahan Muara Bungo Masa  
Penjajahan Belanda**



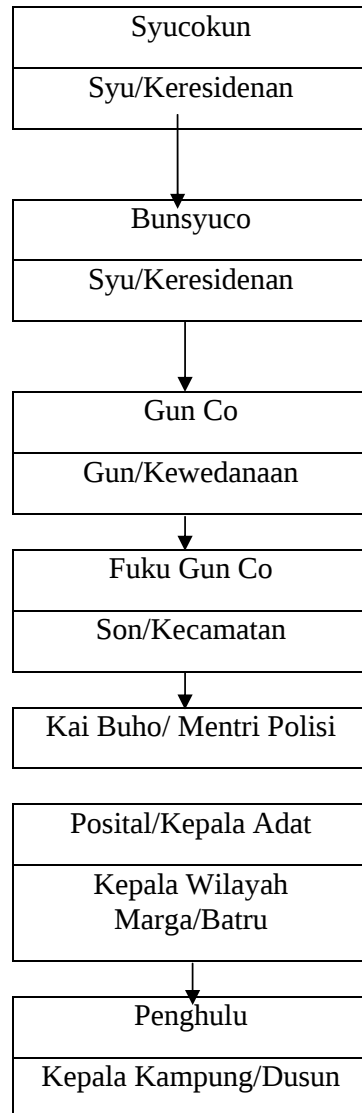
<sup>41</sup>. Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo). Hal :33-34

### 3. Pemerintahan Muara Bungo pada masa Penduduk Jepang

Beberapa waktu setelah pecah perang pasifik tentara Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda, termasuk daerah Muara Bungo. Pemerintahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama dari tahun 1942-1945, walaupun kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama tapi memberikan dampak yang besar terhadap perubahan struktur pemerintahan yang sesuai dengan penjajahan Jepang, hal tersebut berpengaruh terhadap struktur pemerintahan di daerah Muara Bungo. Pada dasarnya pemerintahan Belanda di daerah Muara Bungo pada masa pendudukan Jepang masih dipertahankan. Perubahan yang dilakukan ialah dengan mengganti nama dan istilah pemerintahan Belanda dengan istilah Jepang. Keresidenan diganti dengan *Syu*, sedangkan residen disebut *Syucokun*, *Affdeling* yang dikepalai oleh *Kontroleur* disebut *Busyhio* dan dikepalai oleh *Bunsyuco*, *Onderafdeling Distric* yang dikepalai oleh *Demang* diganti dengan nama *Gun* yang dikepalai oleh *Gon Cu* dan *Polisi Kewedanaan* diganti nama *Kai Buh*<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup>. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Daerah Muara Bungo. Tahun 1945-1949. hal : 7.

**Gambar III.7 Struktur Pemerintahan Muara Bungo Masa****Pendudukan Jepang**

### C. Kota Muara Bungo Sebelum 1967

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Muara Bungo secara keseluruhan bergabung membentuk organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian diroboh menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah dikeluarkannya Maklumat Presiden RI Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)<sup>43</sup>. Para pejuang pendiri terdiri dari Abunjani, Zainul Riva'I, Ramli Umar, Lebai Hasan, M.Saleh bin H.M.Yasin paglima besar lascar jihad fisabillah Lubuk Landai dan banyak lainnya.

Tahun 1947 Pemerintahan Muara Bungo bersama DPR mengambil suatu langkah kebijaksanaan guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan mengadakan pemekaran daerah yaitu membuat wilayah Kecamatan-kecamatan dalam tiap-tiap kewedanaan dan memperbaharui pasirah-pasirah dalam keresidenan dengan berdasarkan IGOB (Inlandssche gemeente Ordonnatie buitengewesten)<sup>44</sup>. Kewedanaan Muara Bungo dibagi dalam tiga Kecamatan :

- a. Kecamatan Rantau Pandan terdiri dari dua Marga, yakni : Marga Bathin III Ulu Muara Buat dan Marga Bathin III Rantau Pandan.
- b. Kecamatan Maura Bungo terdiri dari tiga Marga, Yaitu Marga Pelepat Rantau Keloyang, Marga Bathin III Ilir Muara Bungo dan Marga Bathin II Babeko yang berkedudukan di Muara Bungo.
- c. Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari tiga Marga, yaitu: Marga Bilangan V Tanah Tumbuh, Marga Jujuhan Rantau Ikil dan Marga Tanah Sepenggal.

---

<sup>43</sup>. Wawancara dengan Machmud. Muara Bungo, 26 Mei 2010. Liat juga Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo). Hal : 38

<sup>44</sup>. Sejarah Perjuangan Kemerdekan RI Muara Bungo tahun 1945-1949. hal: 25.

Pada 8 Juli 1949, Muara Bungo dibumi hanguskan untuk menghambat kedatangan Belanda, seperti : Kantor-kantor, gedung-gedung pemerintahan, sekolah dan jembatan Batang Bungo (Tanjung Gedang). Sedangkan bangunan yang berdekatan dengan bangunan rakyat dihancurkan dengan cara menarik dengan mobil, hal ini untuk menghindari bangunan rakyat tidak menjadi korban kebakaran<sup>45</sup>. Periode ini merupakan periode perjuangan fisik yang cukup melelahkan, namun pemerintahan sudah mulai berusaha untuk membenahi administrasi pemerintahan. Suasana pemerintahan pada masa itu diselimuti gejolak patriotik, konsolidasi dan personil pejuang serta penyusunan taktik dan strategi dalam menghadapi Agresi Militer Belanda.

Tahun 1958 dalam peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) Ibukota Kabupaten Meragin pindah dari Bangko ke Muara Bungo diresmikan oleh Gubernur Jambi Letnan Kolonel M.Yoesof Singedekene bertempat kantornya gedung sekolah Cina Cung Hwa Cung Hwi MA kodim sekarang<sup>46</sup>. Berdasarkan Otonomi yang telah dimiliki oleh masing-masing daerah, maka Kota Muara Bungo berperan sebagai Ibukota Muara Bungo dari Provinsi Jambi. Hal yang dilakukan oleh para pemimpin adalah membentuk perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dalam perkembangan pembangunan Kota Muara Bungo. Perangkat pemerintah tersebut seperti Badan Pertimbangan Daerah (BPD), yang anggotanya terdiri dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan unsur fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>45</sup>. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Muara Bungo tahun 1945-1949. hal :45. Liat juga Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo). Hal : 42.

<sup>46</sup>. *Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo)*. Hal :57-60. Pada tahun 1958 peristiwa pergolakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), pindahnya Ibukota Kabupaten Meragin dari Bangkok ke Muara Bungo, oleh karena perkantoran yang terutama kantor Bupati Meragin dibumi haguskan dan Bupati H.Abdul Manap ikut tersandung dan ditahan Militer.

Pada masa awal berdirinya Muara Bungo dengan otonomi daerah yang mandiri, kebanyakan yang menjabat dalam pemerintah bukan penduduk asli kota Muara Bungo sendiri<sup>47</sup>. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya potensi yang dimiliki putera daerah dalam memegang jabatan di pemerintahan. Kebanyakan yang duduk dalam pemerintahan berasal dari luar daerah Muara Bungo, seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Medan dan Jawa. Namun demikian bukan berarti penduduk asli daerah Muara Bungo tidak ada yang berpotensi, ada tapi tidak banyak. Hal tersebut dilakukak karena daerah Muara Bungo masih perlu mendapat bimbingan dari pemerintahan pusat Provinsi Jambi.

### **1. Pembangunan Fisik**

Meskipun dalam Teori Sektor tidak tergambar jelas seberapa jauh jarak area dari suatu pusat kota, namun dalam teori ini jelas mengatakan bahwa sebuah kota berkembang bermula pada sebuah titik yang merupakan pusat perhubungannya. Kota Muara Bungo awal perkembangannya mula-mula dibagun berbagai sarana seperti : sarana pemerintahan, Rumah Penjara (sekarang sebelah kantor pos Muara Bungo), Kantor Angresi Militer, pelabuhan kapal, jembatan Tanjung Gedang dan pasar bertempat di kampung terendam pinggir sungai (Tanjung Gedang). Dari pasar tersebut kemudian kota Muara Bungo mulai berkembang<sup>48</sup>

Tahun 1906 Muara Bungo pada masa penjajahan Belanda, keadaannya masih merupakan sebuah daerah kecil dengan perkembangan segala bidang, diantaranya penambahan penduduk dari Sumtera Barat Leon Raja Medan dan istri keduanya yang berasal dari Dusun Muara Buat, dibidang perniagaan maupun perkebunan karet, pertanian, perumahan dan pembangunan pertokoan tidak terlepas dari kebijaksanaan penguasa pada kala itu. Tahun 1920, perkembangan Muara Bungo semakin pesat dengan pusat pemerintahan

---

<sup>47</sup>. Wawancara dengan Gusman, Muara Bungo April 2010.

<sup>48</sup>. Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo). Hal : 22-34

Belanda sekitar lapangan pusparagam, semua kantor berada disekitar itu dan termasuk agresi militer. Kemudian pelabuhan kapal serta perahu bongkar muat barang di danau boom<sup>49</sup>.

Untuk memulai persyaratan kota yang baik, maka pemerintahan Belanda mulai mengadakan pembangunan-pembangunan dan fasilitas-fasilitas lain yang didirikan pada masa penjajahan Belanda, diantaranya : pasar, fasilitas pendidikan seperti: sekolah rakyat (Vervollock) tahun 1940-an, Tempat kursus pendidikan guru B atau KPKB, SR Negeri II teladan, SGB Negeri Muara Bungo. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Inggalaga tahun 1955. Pelabuhan kapal serta perahu Boom; Hotel, seperti : Pelagi dan hotel One; Sarana rekreasi dan Hiburan, seperti : Bioskop Muara Bungo dan theater, serta sarana olahraga<sup>50</sup>. Sebagai bangunan tersebut ada yang masih dipakai sampai sekarang dan ada juga yang sudah direnovasi dan dijadikan bangunan baru.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kota Muara Bungo mula-mula berkembang di kampung Terendam Tanjung Gedang di jalan Merdeka sekarang, di sekitar pelabuhan, meliputi pasar, sungai batang Bungo dan pusat pemerintahan, dari kawasan tersebut diadakan perluasan sedikit demi sedikit. Pembangunan pada mulanya dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi maupun pemerintahan jajahan. Hal yang dilakukan Belanda mula-mula adalah membangun pelabuhan untuk mudah ekspor karet Muara Bungo, kemudian dibangun pula berturut-turut jembatan, kantor Residen dan beberapa fasilitas lainnya, seperti tempat hiburan dan rekreasi.

Pada masa ini belum ada kebijakan pembangunan yang jelas dalam pembangunan Kota Muara Bungo, terutama dalam pembangunan fisik. Karena pada masa ini pemerintahan kota Muara Bungo sedang berusaha memperbaiki tatanan pemerintah yang baru berdiri, namun demikian pembangunan-pembangunan sudah mulai dilaksanakan walaupun masih bersifat sangat lambat. Pada dekade 1950 merupakan masa transisi dari masa penjajahan ke masa

---

<sup>49</sup>. Ibid, hal : 26-31.

<sup>50</sup>. Ibid, hal : 50-53

kemerdekaan. Masa ini merupakan awal dari usaha pembangunan diberbagai bidang, termasuk perkembangan kota<sup>51</sup>.

Anggaran pembangunan diambil dari Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) dan dana subsidi dari pemerintah pusat. Pembangunan kota juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat ikut serta dalam pembangunan kota. Pembangunan kota Muara Bungo yang terus mengalami peningkatan menjadi minat para penduduk luar kota untuk melakukan urbanisasi ke wilayah kota Muara Bungo. Urbanisasi menyebabkan pertambahan penduduk kota secara cepat. Apalagi kota memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas pembangunan. Selain hal itu yang menjadi menarik, letak kota Muara Bungo yang strategis di jalur lalu lintas Sumatera<sup>52</sup>.

Peningkatan jumlah penduduk mengharuskan pemerintahan Ibu Kota Muara Bungo untuk mengusahakan pembangunan kota. Pembangunan dilakukan bersama masyarakat untuk kemajuan daerah, telah dilakukan berbagai usaha dalam pembangunan fisik maupun ekonomi<sup>53</sup>. Walaupun demikian pemerintahan kota Muara Bungo beserta perangkat daerah lainnya telah berusaha mengadakan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pembangunan guna mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan tersebut diantaranya, adalah :

---

<sup>51</sup>. Urban and Regional Development Institute (URDI) dan yayasan Sugijanto. *Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia dalam Abad 21, Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 2*. (Jakarta:Universitas Indonesia, 2005) hal : 1

<sup>52</sup>. Wawancara Sukarni Mukthar, Muara Bungo, Juli 2010 dan Dahniar.

<sup>53</sup>. *Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo)*. Hal :57. Akan tetapi dalam pembangunan masih mengalami berbagai kendala yang dihadapi adalah dana untuk pembelian tanah sedangkan untuk biaya pembangunan kantor, perumahan dan lainnya sudah tersedia. Kurangnya tenaga ahli yang professional dibidangnya

#### a. Pembangunan Jalan

Usaha pemerintahan dalam pembangunan fisik, di antaranya membangun jalan-jalan untuk mempermudah hubungan dalam kota, kebijakan yang dilakukan adalah membuka jalan-jalan yang menghubungkan pusat kota dengan daerah sekitar, pembangunan jalan ke arah Barat dan Timur, dengan pembukaan jalan ini memungkinkan terjadinya perkembangan wilayah kota. Jalan-jalan yang memberikan pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan wilayah Muara Bungo : jaringan jalan lintas Sumatera atau yang menghubungkan Kabupaten Merangin sampai Kabupaten Muara Bungo dengan perbatasan Provinsi Sumatera Barat, jaringan jalan penghubung antara Kabupaten Muara Bungo dengan Ibukota Provinsi Jambi, jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Muara Bungo (melalui Kecamatan Pelepat) ke Kabupaten Tanjung Jabung, jaringan jalan yang menghubungkan Muara Bungo dengan Lubuk Landai dan Tanah Tumbuh yang selanjutnya ke Rantau Ikil, dan jalur lintas dari Muara Bungo ke Rantau Pandan serta jalur jalan yang menghubungkan Rantau Pandan ke Tanah Tumbuh<sup>54</sup>.

#### b. Perbaikan Pelabuhan

Pelabuhan kota Muara Bungo<sup>55</sup> dibangun pada masa Kolonial Belanda, tahun 1950-an letaknya di tepi sungai Batang Bungo, yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas dari Muara Bungo (pedalaman) ke daerah lain atau sebaliknya. Perbaikan pelabuhan dilakukan untuk mempermudah hubungan perdagangan antar kota Muara Bungo dan daerah luar Muara Bungo. Sejak semula pelabuhan ini merupakan pelabuhan penting di Kota Muara Bungo yang sangat berguna bagi aktifitas ekonomi masyarakat, selain itu juga sebagai sarana

---

<sup>54</sup>. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muara Bungo, *Profil Wilayah tertinggal di Muara Bungo*, tahun 2006.

<sup>55</sup>. Pada masa sekarang pelabuhan kota telah mengalami pendangkalan akibat penebangan hutan dan pembukaan lahan yang makin luas. Debit air sungai semakin merosot dengan resiko banjir besar pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Karena keadaan ini membahayakan kapal-kapal yang bertonase besar, maka pelabuhan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal, terutama pada musim kemarau. Maka pada saat sekarang pelabuhan Muara Bungo tidak berfungsi lagi.

perhubungan antar penduduk kota Muara Bungo dengan penduduk yang ada di seberang sungai.

### c. Pembangunan dan Perbaikan Beberapa Prasarana

Pembangunan perumahan staf bupati dan rumah karyawan diberikan kepada pemborong local dua beradik Ali Rajo Medan dan Ibrahim Rajo Intan, tanahnya berasal dari tanah orang tuanya Leon Rajo Medan Inklusiv dengan biaya pembangunan. Komplek Bungo Baru atau Muara Bungo dibangun diatas tanah milik pribadi, tokoh masyarakat yang dermawan Ali Rajo Medan Adalah Bapak Mertua dari Hoessin Saad<sup>56</sup>. Komplek perkantoran dan rumah dinas Bupati diresmikan pemakainnya tahun 1960 oleh Gubernur Jambi Kolonel TNI AD M.Yosoef Singedekane dan ketua DPRDP TK II Jambi H.Muhammad Saleh Yasin. Nama Bungo Baru yang diberikan oleh H.Hoessin Saad Camat Muara Bungo selaku ketua pembangunan perluasan kota Muara Bungo sebagai Ibukota Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati A.Ali Soedin yang berasal dari Sarolangun<sup>57</sup>.

Sekarang bekas kantor Bupati dijadikan kantor PDM (Perwira Disteri Militer), Kepala Polisi wilayah (KPW) Muara Bungo, KPK (Kepala Polisi Kabupaten). Perumahan staf Bupati dan kompleks karyawan semenjak berdiri dan dipakai masih seperti sediakala, belum mendapat perbaikan yang artinya dari Pemerintah Kabupaten Muara Bungo<sup>58</sup>. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, menunjukan bahwa kota Muara Bungo memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya bagi penduduk kota Muara Bungo saja tetapi juga bagi kelancaran perekonomian daerah sekitar. Sebagai daerah pusat Ibukota pemerintah, banyak aktivitas pemerintah yang dilakukan. Hal itu terlihat dengan banyaknya orang atau pejabat-pejabat daerah Kabupaten yang keluar masuk ke pusat kota untuk mengurus masalah administrasi-administrasi dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pusat.

---

<sup>56</sup>. *Legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo)* . Hal : 57

<sup>57</sup>. Wawancara Sukarni Mukthar, Muara Bungo 5 Juni 2010 dan Emi, 30 Mei 2010.

<sup>58</sup>. *Legenda Muara Bungo (asala Muasal Muara Bungo)*. Hal : 60-61.

Aktivitas lainnya juga terlihat dalam bidang pendidikan, masyarakat yang tinggal di daerah luar kota menganggap tingkat dan mutu pendidikan di kota Muara Bungo lebih baik dibandingkan daerah-daerah Kecamatan.

Dengan demikian pembangunan yang telah dilakukan daerah sedikit banyak telah dilakukan dan secara bertahap sudah memperlihatkan adanya pembangunan. Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah di antaranya, seperti ; membangun gedung-gedung sebagai pusat pemerintahan kota dan pembangunan jalan-jalan untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat baik dalam wilayah kota Muara Bungo maupun daerah luar kota, tujuannya untuk mempermudah hubungan daerah sekitar kota Muara Bungo dalam usaha memenuhi kebutuhan kota untuk menuju pusat kota. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Muara Bungo, di mana kota Muara Bungo merupakan daerah pusat kegiatan ekonomi terutama perdagangan.

## **2. Keadaan Sosial Ekonomi**

Apabila dilihat dari hasil buminya, semenjak dulu daerah Muara Bungo terkenal sebagai Penghasil karet. Pada awal abad ke-20, bibit karet masuk ke Sumatera melalui para pekerja pendatang di perkebunan, pedagang, maupun para jamaah haji. Berdasarkan laporan seorang staf penyuluh pertanian pada 1918, bahwa kebun karet rakyat pertama kali dibudidayakan di Jambi pada 1904 dengan sistem tebas bakar sehabis menanam padi ladang. Karet yang mereka tanam ada yang dipelihara, tetapi banyak juga yang tidak, sehingga tampak seperti tanaman "liar" yang tumbuh diantara tumbuhan hutan lainnya. Sistem ini masih berlangsung hingga saat ini dan dikenal dengan sistem wanatani karet. Selain menjadi sumber pendapatan utama dan sebagai cash income bagi petani, Saat ini terdapat sekitar 87.887 ha kebun karet yang dikelola secara tradisional dan disadap oleh sekitar 45.228 petani dengan rata-rata kepemilikan 2 ha lahan. Tak mengherankan bila karet menjadi penyumbang

terbesar dan diikuti oleh kelapa sawit, kopi, dan Cassiavera (kayu manis), karet masih yang terbanyak dan menjadi komoditas ekspor terbesar Kabupaten Bungo<sup>59</sup>.

Wilayah kota Muara Bungo banyak dialiri anak-anak sungai Batang Bungo dan Batang Tebo, hal tersebut sangat memungkinkan masyarakat Kota Muara Bungo, terutama mereka yang tinggal di daerah dekat sungai. Hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya juga menambah pendapatan. Ada dua macam perdagangan yang berkembang di daerah Muara Bungo, perdagangan dalam Negeri dan perdagangan luar Negeri.

#### a. Perdagangan dalam Negeri

Sebelum kemerdekaan, pada umumnya perdagangan dalam Negeri dilakukan setiap individu atau kelompok yang ingin memasarkan barang dagangannya, setiap individu atau kelompok yang melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan makanan bahan kebutuhan dan perlengkapan hidupnya sehari-hari seperti : makanan, pakaian, tempat tinggal, perhiasan rumah tangga seperti alat-alat dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Perdagangan dalam Negeri yang dilakukan rakyat diantaranya berupa: Beras, Gula Pasir, Garam, minyak goreng, batik, ikan asin, tepung terigu, minyak tanah dan sayur-sayuran. Penyaluran barang-barang tersebut dapat dilakukan melalui perhubungan darat mau pun melalui perhubungan sungai<sup>60</sup>.

#### b. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar Negeri meliputi ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian kota Muara Bungo, terutama perdagangan karet yang sudah berlangsung jauh sebelum penjajahan Belanda. Perdagangan tidak hanya antar wilayah di daerah Muara Bungo, tetapi juga luar Negeri.

---

<sup>59</sup>. [www.kabupatenBungo.go.id](http://www.kabupatenBungo.go.id): selayang Pandang. Go.id

<sup>60</sup>. Wawancara dengan Sukarni, Muara Bungo 2010

### 3. Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan di Muara Bungo, seperti perhubungan darat dan perhubungan sungai. Perhubungan melalui sungai dan darat memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Muara Bungo :

#### a. Perhubungan Darat

Pada masa penjajahan Belanda sudah dibangun jalan-jalan darat yang mempermudah pengangkutan karet dari daerah-daerah penghasil karet baik yang berada dalam kota Muara Bungo maupun yang berada di luar daerah Muara Bungo, hal tersebut akan menunjang perkembangan ekonomi Muara Bungo terutama lalu lintas perdagangan karet. Pada saat menjelang revolusi perhubungan darat masih sangat minim dan jarak yang ditempuh antar daerah sangat jauh, jalan-jalan pada saat itu kondisinya masih sangat memperhatikan atau rusak berat, pada saat ditempuh bisa memakan waktu yang sangat lama<sup>61</sup>.

#### b. Perhubungan Sungai

Tahun 1950-an, perhubungan terpenting di Muara Bungo adalah danau Boom dengan pelabuhan Motor yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Wilayah Muara Bungo di aliri oleh dua aliran sungai Batang Bungo dan sungai Batang Tebo. Karena kedua wilayah tersebut di aliri sungai, maka untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut menggunakan sarana seperti perahu, rakit dan kapal roda. Pada masa lalu perhubungan melalui sungai masih sangat sulit karena masih terbatasnya sarana, namun pada masa sekarang perhubungan sudah lancar dengan didirikannya jembatan penghubung (Jembatan Batang Bungo dan Jembatan Batang Tebo)<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup>. Geografi Budaya Daerah Muara Bungo. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>62</sup>. Wawancara dengan Dahniar. Muara Bungo, 22 Mei 2010. Liat juga *legenda Muara Bungo (asal muasal Muara Bungo)*. hal : 31. Keadaan geografis sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah kota, baik fungsi dan bentuk fisik dari perkembangan kota tersebut.

### C. Master Plan Kota Muara Bungo

Salah satu langkah yang sangat strategis yang telah dilakukan dalam pelita IV adalah ditetapkan Rencana Induk Kota Muara Bungo. Fungsi dari Rencana Induk Tata Kota, yakni untuk memberikan arahan yang tepat guna penempatan daerah pusat pelayanan dan pengembangan kota demi terwujudnya kota yang baik. Selain itu terdapat dua fungsi kota yang diembankan oleh kota Muara Bungo, pertama: kota Muara Bungo berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan transportasi, atau lebih dikenal dengan fungsi primer kota yang berpeluang bagi kota Muara Bungo untuk dapat berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang intensif. Fungsi kedua adalah kota Muara Bungo sebagai fungsi sekunder, dimana sebagai kegiatan pemerintahan, pendidikan, pemukiman<sup>63</sup>.

Untuk memudahkan di dalam pelaksanaannya, di dalam RUTR (rencana umum tata ruang kota) ini telah ditetapkannya 5 kawasan atau wilayah yang diprioritaskan untuk pembangunannya<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup>. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kawasan Strategis Muara Bungo.

<sup>64</sup>. Ibid. Liat juga Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Muara Bungo. 2001.hal : IV-8 – IV-II.

### 1. Bagian Wilayah Kota (BWK) A

Bagian wilayah kota ini merupakan bagian wilayah yang terletak di pusat kota Muara Bungo. Dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kegiatan komersial sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pertokoan. Bagian wilayah kota A ini memiliki luas 814, 5 ha dan terletak di tengah-tengah kota Muara Bungo dan meliputi Kelurahan Bungo Barat, Bungo Timur, Sungai Pinang dan sebagian kecil Kelurahan Manggis, kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan tanjung Gedang. BWK A terbagi menjadi tiga lingkungan permukiman (LP) III dan dilalui oleh Batang Tebo dan anak-anak sungainya serta rawa-rawa. BWK A ini berfungsi sebagai :

- a. Pusat perdagangan atau pertokoan, hotel dan restaurant dan jasa-jasa skala regional local.
- b. Pusat terminal antar kota
- c. Pusat permukiman penduduk
- d. Pusat pemerintahan Kecamatan Muara Bungo dan
- e. Fasilitas perkantoran yang berfungsi untuk pelayanan umum dan pusat pelayanan penduduk skala BWK dan LP

### 2. Bagian Wilayah Kota (BWK) B

Bagian wilayah kota B ini terletak di bagian Selatan kota Muara Bungo. Fungsi yang dominan di BWK ini adalah sebagai kawasan perkantoran atau pusat pemerintahan Kabupaten Muara Bungo. BWK ini memiliki luas 1417,5 ha dan terdiri dari 4 lingkungan pemukiman (LP) III dan secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Pasir Putih. BWK ini mempunyai fungsi :

- a. Pusat pemerintahan atau perkantoran Kabupaten Muara Bungo
- b. Pusat kegiatan olah raga
- c. Pusat Dakwah (Islamic Centre)
- d. Kegiatan rekreasi hutan kota dan rekreasi danau buatan
- e. Pusat permukiman dan pusat pelayanan skala BWK dan LP

### 3 Bagian Wilayah Kota (BWK) C

Bagian wilayah kota C ini terletak di sebelah Utara BWK A dan secara administrasi termasuk dalam wilayah Kelurahan Manggis dan sebagian kecil Kelurahan Tanjung Gedang. Selain dilalui jalur Lintas Sumatera, BWK ini juga dilalui oleh jalan raya Muara Bungo-Jambi. BWK ini mempunyai morfologis yang relatife datar dan bergelombang serta memiliki luas 1.188 ha yang terdiri dari 3 LP III. BWK ini memiliki potensi sebagai lahan cadangan bagi perkembangan fisik kota dimasa mendatang. BWK ini mempunyai fungsi utama sebagai:

- a. Pusat Permukiman
- b. Pusat kawasan pendidikan tertinggi
- c. Kawasan terminal regional
- d. Pergudangan, bengkel dan industri ringan

### 4. Bagian Wilayah Kota (BWK) D

Bagian wilayah BWK D ini terletak disebelah Utara kota bersebelahan dengan BWK C, yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Kelurahan Manggis. Morfologi lahannya relatif datar dan bergelombang dan dilalui oleh Batang Tebo di bagian Selatannya. Selain dilalui oleh jalur Lintas Sumatera, BWK ini juga dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan kota Muara Bungo dan Kecamatan Tanah Tumbuh. BWK ini mempunyai luas 760,5 ha dan terdiri dari 2 lingkungan permukiman III. Fungsi utama yang direncanakan pada BWK ini adalah :

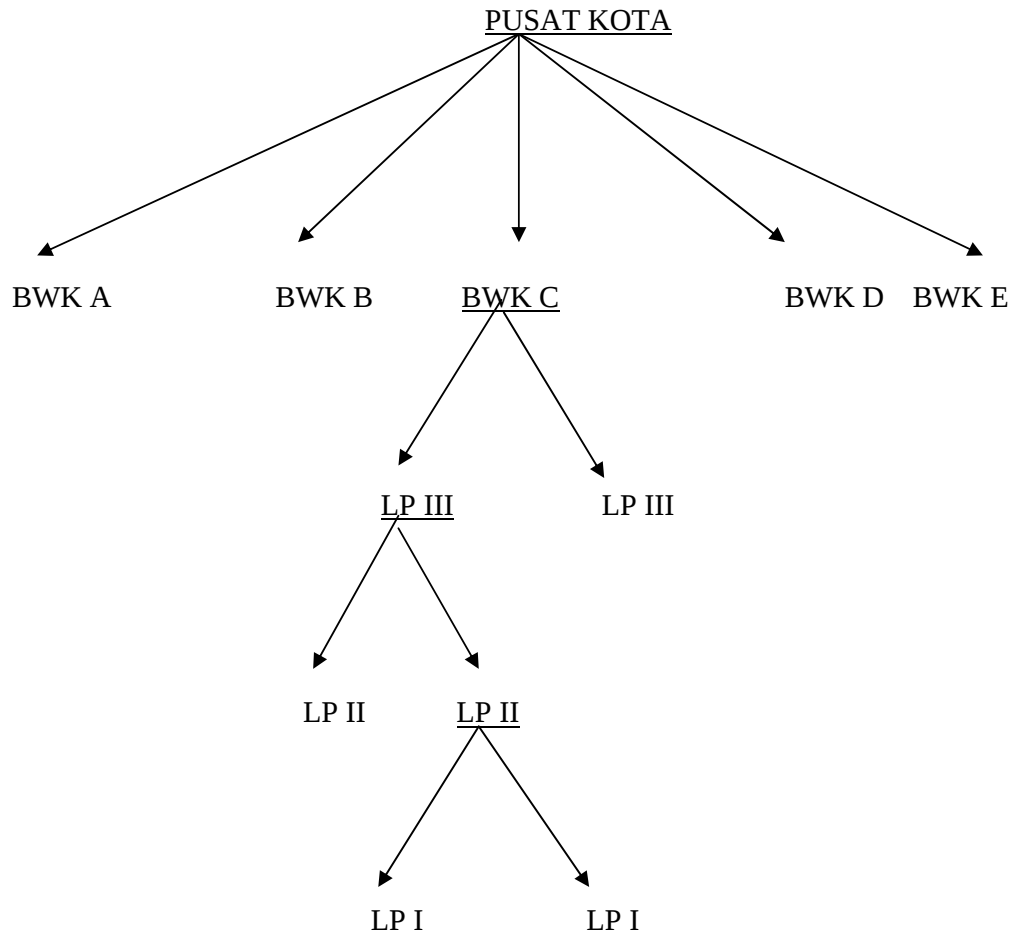
- a. Pusat permukiman
- b. Pusat pelayanan skala BWK dan LP
- c. Pusat pengembangan rekreasi air
- d. Pertanian lahan kering dan cadangan pengembangan kota.

### 5. Bagian Wilayah Kota (BWK) E

BWK ini terletak di bagian Utara kota Muara Bungo dan berbatasan dengan BWK C dan BWK D. Secara administrasi BWK ini termasuk kedalam Kelurahan Manggis. Morfologi

lahannya relatif datar dan bergelombang serta terdapat anak-anak sungai. BWK ini juga relatif belum terbangun serta berpotensi sebagai lahan cadangan untuk perkembangan kota dimasa mendatang. Perkembangan yang intensif hanya terjadi disepanjang sisi jalan Lintas Lintas Sumatera. BWK ini mempunyai luas 769,5 ha dan terdiri dari 2 LP III. Fungsi utama yang direncanakan pada BWK ini adalah sebagai pusat permukiman, pusat pelayanan masyarakat skala BWK dan LP serta akan dikembangkan sebagai kawasan perguruan tinggi.

Konsep desain sistem lingkungan pada wilayah perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar :



Keterangan :

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Pusat Kota        | = jumlah penduduk mendukung |
| BWK A, B, C, D, E | = 10.000-20000 jiwa         |
| LP III            | = 4.500-5.500 jiwa          |
| LP II             | = 1.500-2.000 jiwa          |
| LP I              | = 250-300 jiwa              |

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kota Muara Bungo merupakan salah satu kota di Indonesia yang terletak di pedalaman Sumatera. Pemerintahan kota Muara Bungo berdiri pada tahun 1946, dengan Ibukota pertama terdapat di Bangko dan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Pemerintahan pusat mengalihkan Ibukota dari Bangko ke kota Muara Bungo. Pada tahun 1958 masyarakat Kewedanaan Bangko dan masyarakat Kewedanaan Sarolangun mengajukan usul kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, agar Kabupaten Meragin dimekarkan menjadi dua Kabupaten. Pemerintahan dapat menerima usul dan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 dibentuklah : Kabupaten Sarolangun Bangko ibukotanya adalah Bangko dan Kabupaten Batang Tebo dengan Ibukotanya Muara Bungo.

Daerah berkembang dan makin maju, maka sesuai dengan tuntutan zaman dan keinginan dari rakyat. Maka tahun 1999 keluar Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 memekarkan lagi Kabupaten Bungo Tebo menjadi dua Kabupaten, yaitu : Kabupaten Bungo Ibukotanya Muara Bungo dan Kabupaten Tebo ibukotanya Muara Tebo. Semenjak saat itu kota Muara Bungo mengalami berbagai dinamika perkembangan, mulai dari Ibukota kerisidenan sampai menjadi Ibukota sendiri.

Seperti kota lainnya, kota Muara Bungo tumbuh menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan bagi daerah kota dan daerah sekitarnya. Maka diadakanlah pembangunan yang mendukung pemenuhan sarana dan pra sarana untuk keperluan masyarakat kota, baik pembangunan dibidang fisik maupun pembangunan ekonomi. Pembanguann tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan tetapi juga bersama masyarakat guna untuk menciptakan kemakmuran bersama.

Pembangunan fisik kota Muara Bungo, membutuhkan suatu rancangan Arah Penata Ruangan Daerah yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah kota Muara Bungo sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka pada masa Otonomi Daerah disusunlah Tata Ruang Wilayah Muara Bungo. Kota Muara Bungo dibagi dalam 6 bagian wilayah kota. Yang menjadi pusat perkembangan adalah daerah bagian wilayah Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Pembangunan ekonomi di sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Pembangunan ekonomi kota Muara Bungo terus mengalami peningkatan dari tahun 1999 sampe sekarang. Pembangunan tersebut diarahkan sejalan dengan pemanfaatan potensi unggulan ekonomi daerah yang berdasarkan pada gambaran dari kondisi geografis dan fisik daerah serta sumberdaya manusia. Potensi unggulan ekonomi daerah kota Muara Bungo ini merupakan gambaran dari struktur ekonomi kota yang didominasi pada empat sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restaurant, sektor pertambangan penggalan, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan dan sektor jasa-jasa.

Bahwa kebijakan pemerintahan sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan kota Muara Bungo, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A.Data Arsip atau Dokumen Pemerintahan Kota Muara Bungo**

BAPPEDA. Profil Wilayah Tertinggal Kota Muara Bungo. 2006

Data Badan Pusat Statistik (1971-2008) dan BAPEDDA kota Muara Bungo berupa data geografis dan pembangian wilayah daerah kota Muara Bungo, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dinas Pendapatan Muara Bungo. Laporan Akuintabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Muara Bungo. 2006.

Kecamatan Muara Bungo Dalam Angka tahun 1983-1998

Laporan akhir bantuan teknis penyusunan, rencana tata ruang wilayah. 2003-2005.

Pasar Muara Bungo Dalam Angka tahun 2007-2008

Peraturan daerah kota Muara Bungo Nomor. 03 tahun 2002, peraturan daerah kota Muara Bungo Nomor.03 tahun 2002, tentang program pembangunan daerah kota Muara Bungo.

PDRB kota Muara Bungo tahun 1999-2009 menurut lapangan usaha dan harga yang berlaku

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Muara Bungo tahun 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 mengenai peraturan daerah otonom kota-besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah.

Statistik Kependudukan Kecamatan Muara Bungo tahun 2001-2002

## B. Buku

- Artur B. Gallian. 1996. *Perancang Perencanaan Kota*, Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Bintarto.1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Bakarudin dan Yurni Suasti. 1994. *Dasar-dasar geografis Kota*. Padang:IKIP Padang Press.
- Bakarudin. *Studi perkembangan dan Peremajaan Kota*. 1994. Padang : IKIP.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Kebangkitan Daerah Muara Bungo. 1978/1979*.
- Ilhami, 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Imam Asy'ary. *Sosiologi Kota dan Desa*. 1993. Surabaya. Usaha Nasional
- Kumpulan Makalah Diskusi. 1979. *Samudra Pasai Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta:Depdikbud RI.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. 1994. Jakarta. Tiara Wacana
- Lembanga Adat Muara Bungo, *Buku Pedoman Adat Muara Bungo*. 2004. Muara Bungo  
, *Buku Pedoman Pemberian Gelar Adat di Bumi Langkah Serentak Limbah Seayun*.  
2002. Muara Bungo.
- Lincoln Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajaha Mada.
- Legenda Muara Bungo (*asal muasal Muara Bungo*)
- Marbun, BN. 1990. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Jakarta:Erlangga.
- Marwati Djoned Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta. Balai Pustaka
- Mestika Zed. 2003. *Metodologi Sejarah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Nafrizonny. 2004. *Ringkasan Eksklusif Kecamatan Muara Bungo*. Koordinasi Statistik  
Kecamatan Muara Bungo.
- N.Daljoeni. *Geografis Kota dan Desa*. 1978. Bandung. PT. Alumni.
- Pemerintahan Kota Muara Bungo (BPPD). *Muara Bungo Sekilas Lintas*. 2005.
- Pemerintahan Daerah (PEMDA) Muara Bungo.
- Raharjo. *Perkembangan Kota dan Pembangunan*. 1996. Jakarta. Bumi Aksara.
- Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). 2005.
- Sartono, Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta:  
Gramedia.
- Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Muara Bungo. 1945-1949.

The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan di Negara RI*. Yogyakarta:Liberty.

Urban and Regional Development Institute (URDI) dan yayasan Sugijonto. 2005. *Bunga Rampai Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 2*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### **C.Tesis dan Skripsi**

Firama Donna. 2006. Perluasan Kota dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kota Padang 1980-1998. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Handayani.1999. Sejarah Kota Painan. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Kumala Dwi Septiani. 2009. Kota Jambi : Studi Tentang Perkembangan Di Pinggir Sungai Batang Hari. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Nurhajidarmi. 2002. Sejarah Kota Muara Sijunjung (1969-1994). Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Wisma, Thelma. 2003. Sejarah Kota sungai Penuh 1958-1998. Skripsi. Padang : Universitas jNegeri Padang.

Zul Asri. 2001. Searah Kota Bukittinggi 1945-1980 : Perkembangan Kota Secara Fisik dan Hubungannya dengan Kepemilikan Tanah. Tesis. Depok : Universitas Indonesia.

### **D.Majalah dan Artikel**

1. Kutipan beberapa artikel dari internet. Situs resmi Kota Muara Bungo  
<http://www.selayangpandang.go.id>.
2. Zaid, Otonomi Daerah Saat Ini ".www.Google"